

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada umumnya difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan diidentikkan dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita, atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan meningkatnya pendapatan per kapita masalah-masalah yang dihadapi seperti pengangguran, kemiskinan, dan Ketimpangan distribusi pendapatan dapat terpecahkan melalui apa yang dikenal dengan *trickle down effect*.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Dengan memperhatikan besarnya peranan masing-masing dalam PDRB, skala prioritas pembangunan dapat ditentukan.

Tingkat pertumbuhan riil PDRB atau yang lebih populer dengan istilah Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu wilayah.

PDRB dapat dihitung berdasarkan beberapa pendekatan antara lain pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penggunaan/

pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan ketiga cara di atas secara konsep hasilnya sama. Sampai saat ini BPS Provinsi Jambi telah menghitung PDRB dengan dua pendekatan yakni pendekatan produksi dan pendekatan penggunaan/pengeluaran.

Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2010 ini berisi analisis PDRB dari sisi sektoral, kemudian dilanjutkan dengan analisis PDRB dari sisi pengeluaran/penggunaan. Selanjutnya di bagian akhir terdapat analisis ketimpangan regional antar wilayah di Provinsi Jambi dan pengklasifikasian wilayah berdasarkan Typology Klassen.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis struktur ekonomi serta laju pertumbuhan sektoral dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha.
2. Menganalisis struktur komponen pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB menurut penggunaan.
3. Melihat seberapa besar ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4. Melihat klasifikasi pembangunan wilayah berdasarkan Typologi Klassen.

1.3. Ruang Lingkup Penulisan

Batasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Series Data PDRB yang dipakai dalam penulisan ini adalah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010.
2. Ukuran ketimpangan yang digunakan adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan Indeks Williamson.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Konsep dan Definisi

Konsep-konsep yang digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini adalah sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Angka PDRB atas dasar harga pasar diperoleh dari penjumlahan nilai tambah bruto (NTB), yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan, yaitu upah dan gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian yang ada di wilayah Provinsi Jambi.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Pada PDRN atas dasar harga pasar ini sudah dikeluarkan nilai penyusutan. Penyusutan adalah susutnya nilai barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Penyusutan disini adalah nilai susut seluruh barang di sektor perekonomian dalam Provinsi Jambi.

c. PDRN Atas Dasar biaya Faktor Produksi

Diperoleh dari PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Pajak tak langsung meliputi pajak penjualan, pajak tontonan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.

d. Pendapatan Regional

Berdasarkan konsep-konsep diatas dapat diketahui bahwa PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di Provinsi Jambi. Balas jasa faktor produksi

meliputi: upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan laba/keuntungan, atau merupakan pendapatan yang berasal dari wilayah Provinsi Jambi.

Pendapatan Regional Provinsi Jambi adalah PDRN atas dasar biaya faktor produksi ditambah dengan pendapatan dan penerimaan dari luar Provinsi Jambi dikurangi dengan pendapatan/penerimaan yang mengalir keluar dan masuk diasumsikan saling meniadakan. Sehingga PDRN atas dasar biaya faktor sama dengan Pendapatan Regional.

e. PDRB Per Kapita

Merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

f. Pendapatan Regional Per Kapita.

Nilai PDRN atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

2.2. Penghitungan PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan Dan Perikanan

1.1. Subsektor Tanaman Bahan Makanan

Subsektor tanaman bahan makanan meliputi kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan segala jenis tanaman yang digunakan untuk keperluan bahan makanan dan diusahakan secara perorangan ataupun bersama, tanpa memperhatikan hak, bentuk hukum maupun ukuran dan lokasinya. Jenis komoditi yang dicakup adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Sumber data produksi untuk padi dan palawija diperoleh dari BPS Provinsi Jambi, sedangkan data produksi sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman pangan Provinsi Jambi. Nilai Produksi diperoleh dengan mengalikan produksi dengan harga produsen. Sedangkan data rasio biaya antara dan penyusutan diperoleh dari publikasi Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan tabel I-O serta Survei Khusus Pendapatan Regional Provinsi Jambi.

1.2 Sub sektor Tanaman Perkebunan

1.2.1 Perkebunan Rakyat

Perkebunan rakyat mencakup komoditi perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, tebu, kapuk, pinang dan tembakau. Disamping itu termasuk pula produksi ikutannya dan hasil pengolahan sederhana seperti karet remah, gula merah, minyak kelapa rakyat dan tembakau olahan.

Data produksi diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Rasio biaya antara dan penyusutan dari Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) dan Tabel I-O.

1.2.2 Perkebunan Besar

Perkebunan Besar ini mencakup komoditi perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan yang besar seperti karet, teh, kelapa sawit. Output (Nilai Produksi Bruto) sub sektor perkebunan diperoleh dengan cara mengalikan produksi dengan harga produsen. Penghitungan nilai tambah sub sektor ini diperoleh dengan mengurangi biaya antara terhadap outputnya.

1.3 Subsektor Peternakan

Kegiatan subsektor peternakan meliputi usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan atau diambil hasilnya, baik dilakukan sebagai usaha rumah tangga maupun oleh perusahaan peternakan. Jenis ternak yang dicakup meliputi sapi, kerbau, kuda, babi, kambing/domba, ayam dan itik, sedangkan hasil-hasil ternak adalah telur, kulit, susu dan sebagainya.

Sumber data produksi ternak diperoleh dari Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Rasio biaya antara dan penyusutan diperoleh dari Tabel Input-Output (I-O) dan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR).

1.4 Subsektor Kehutanan

Subsektor ini mencakup kegiatan penebangan/pemotongan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi yang dicakup meliputi kayu glondongan (logs)

baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budi daya, rotan, damar, sarang burung dan getah-getahan lainnya. Data produksi bersumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Sedangkan data harga per komoditi yaitu IHPB yang diperoleh dari BPS. Rasio biaya antara dan penyusutan diperoleh dari Tabel I-O dan SKPR.

1.5 Subsektor Perikanan

Subsektor Perikanan mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budi daya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Data produksi dan output diperoleh dari Dinas Perikanan Provinsi Jambi. Rasio biaya antara dan penyusutan dari Tabel I-O dan SKPR

Metode penghitungan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah **sektor pertanian** adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan tersedianya data produksi dan harga masing-masing komoditi pertanian. Secara umum, nilai output setiap komoditi diperoleh dari hasil perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga produsen komoditi yang bersangkutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap (*mark-up*) yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Nilai Tambah Bruto (NTB) didapat dari pengurangan nilai output atas harga produsen dengan seluruh biaya antara.

Untuk penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode revaluasi, yaitu seluruh produksi dan biaya-biaya antara dinilai berdasarkan harga pada tahun dasar 2000. Khusus untuk sub sektor peternakan, penghitungan produksi tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi diperoleh melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yaitu : banyaknya ternak yang dipotong, ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak.

2. Sektor Pertambangan Dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor pertambangan dan penggalian, dikelompokkan dalam tiga sub sektor, yaitu : pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan bukan migas, dan penggalian.

2.1 Pertambangan Migas

Meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau dipasarkan. Komoditi yang dihasilkan adalah minyak bumi, kondensat, gas bumi, dan uap panas bumi.

Data produksi diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi. Data harga minyak bumi, menggunakan harga tertimbang ekspor dan domestik, sedangkan harga kondensat menggunakan harga ekspor, dan sumber datanya berasal dari Statistik Ekspor BPS. Harga ekspor kondensat yang dipakai berupa ratio harga ekspor kondensat terhadap minyak mentah dikalikan dengan harga ekspor minyak mentah dari Statistik Ekspor BPS. Harga gas bumi menggunakan harga tertimbang ekspor dan domestik dari publikasi Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, BPS.

Biaya antara untuk masing-masing komoditi diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output hasil penyusunan Tabel I-O

Pendekatan penghitungan yang dipakai adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga per unit produksi masing-masing tahun. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengurangi output dengan biaya antara. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit pada tahun dasar.

2.2 Pertambangan Bukan Migas

Pertambangan bukan migas yang ada di Provinsi Jambi hanya batu bara dan inipun produksinya belum stabil setiap tahun. Untuk memperoleh output digunakan metode pendekatan produksi sama seperti halnya migas.

2.3 Penggalian

Sub sektor ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir, dan tanah yang pada umumnya berada pada

permukaan bumi. Output penggalian diperoleh dari output Bangunan dan industri yang menggunakan bahan galian.

3. Sektor Industri Pengolahan

Industri Pengolahan diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok besar yaitu Industri pengolahan migas dan Industri pengolahan bukan migas.

3.1 Industri Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Sub sektor ini mencakup kegiatan pengilangan minyak dan gas bumi serta pengolahan, penampungan, pendistribusian gas alam cair dengan tujuan untuk dijual atau dipasarkan. Pengilangan minyak bumi produksinya antara lain : avtur, avigas, ado, ido, migas, minyak tanah, minyak bakar, termasuk LPG yang dihasilkan oleh pengilangan gas alam. Untuk Jambi baru ada produksi LPG hasil pengilangan gas alam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2002.

3.2 Industri Pengolahan Tanpa Migas

Sub sektor ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) jenis sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) sektor Industri, yaitu:

1. Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau
2. Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki
3. Industri Kayu dan barang dari Kayu Lainnya
4. Industri Kertas dan Barang Cetakan
5. Industri Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet
6. Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam
7. Industri Logam Dasar Besi dan Baja
8. Industri Angkutan, Mesin, dan Peralatannya
9. Industri Barang Lainnya

Dalam penghitungan nilai output, biaya antara dan nilai tambah atas dasar harga berlaku, untuk *industri besar dan sedang* (B/S) didasarkan pada data yang diperoleh dari Survei Industri Besar dan Sedang yang dilakukan Badan Pusat Statistik setiap tahun. Sedangkan *industri kecil dan kerajinan rumah tangga* (IKKR)

besarnya output bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Provinsi Jambi dan Sensus Ekonomi. Rasio biaya antara dan penyusutan berdasarkan SKPR dan hasil survei industri B/S.

4. Sektor Listrik Dan Air Minum

4.1 Subsektor Listrik

Kegiatan subsektor ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) maupun non PLN. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan didistribusikan, termasuk listrik yang dicuri.

Metode penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output masing-masing tahun dihitung dari *jumlah Kwh produksi yang dibangkitkan dikalikan dengan rata-rata tarif per Kwh*, nilai output dikurangi dengan biaya antara maka didapat nilai tambah bruto. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi.

4.2 Sub Sektor Air Bersih

Subsektor air minum mencakup proses pengadaan, pembersihan, penyulingan/pemurnian, dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum. Data produksi, harga dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum diperoleh langsung dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian kuantum produksi dengan rata-rata output harga per KWH. Sedangkan output atas dasar harga konstan dihitung dengan cara revaluasi.

5. Sektor Bangunan

Konstruksi / Bangunan adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sarana kegiatan lainnya. Kegiatan sektor Bangunan meliputi kegiatan pembuatan, pemasangan/instalasi, perombakan, perbaikan bangunan. Hasil kegiatan ini antara lain bangunan tempat tinggal,

bangunan bukan tempat tinggal, konstruksi bangunan sipil (jalan, jembatan, drainase terminal, dermaga, bandar, dsj), konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi (seperti pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan bangunan jaringan komunikasi), pengerukan (pengerukan sungai dan alur pelayaran), dan sebagainya termasuk penyewaan alat konstruksi dengan operatornya (seperti bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang dsj).

6. Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran

6.1 Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran

Subsektor perdagangan besar dan eceran meliputi kegiatan pembelian dan penjualan barang, baik barang baru maupun barang bekas, dengan tujuan untuk disalurkan *tanpa* mengubah sifat barang tersebut.

Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru/bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan, dan lembaga nirlaba.

Perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan ataupun rumah tangga tanpa merubah sifat barang. Metode yang digunakan adalah metode arus barang. Output atau margin perdagangan merupakan selisih antara nilai jual dan nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi dengan biaya angkut barang dagangan yang dikeluarkan pedagang. Dengan metode ini output dihitung berdasarkan margin perdagangan yang timbul akibat memperdagangkan barang-barang dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan serta barang yang berasal dari impor. Margin ini diperoleh dari hasil perkalian antara output sektoral dengan besaran rasio margin perdagangan dan rasio marketed surplus. NTB diperoleh dengan mengalikan total outputnya dengan ratio NTB.

6.2 Subsektor Hotel

Subsektor ini menyangkut kegiatan penyediaan akomodasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan, beserta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang dan masih dalam satu kesatuan manajemen, seperti binatu, restoran, diskotik, tempat olah raga, penyewaan

ruangan, dan sebagainya. Jenis kegiatan perhotelan yang dicakup meliputi hotel, losmen, wisma, hostel, pesanggrahan, bungalow, pondok, dan sejenisnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian indikator produksi dengan indikator harga. Sedangkan output atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi, dimana jumlah malam kamar sebagai ekstrapolatornya.

6.3 Subsektor Restoran

Subsektor ini mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang langsung dikonsumsi/dihidangkan di tempat penjualan, baik dengan tempat tetap maupun tidak tetap/berpindah-pindah (dijajakan secara berkeliling). Kegiatan tersebut antara lain meliputi usaha restoran, warung, kantin, jasa boga, kedai, pedagang makanan/minuman keliling.

Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh satuan usaha di sektor lain karena sulit dipisahkan, digolongkan kedalam sektor yang mengusahakannya. Misalnya kegiatan restoran untuk pelayanan tamu hotel, digolongkan sebagai bagian usaha perhotelan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah tenaga kerja di sub sektor restoran dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makanan dan minuman jadi di luar rumah, atau rata-rata output restoran per tenaga kerja. Jika keduanya dikalikan akan didapat output atas dasar harga berlaku. Output konstan dihitung dengan deflasi dimana IHK kelompok makanan jadi, minuman dan rokok sebagai deflatornya.

Indikator produksi sub sektor ini berasal dari Sensus Penduduk ataupun Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), sedangkan indikator harga berasal dari Susenas dan IHK Jambi.

7. Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai dan danau serta udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan kegiatan komunikasi.

7.1 Angkutan Darat

Meliputi seluruh kegiatan pengangkutan penumpang dan barang termasuk pula kegiatan charter /sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa.

Data mengenai jumlah kendaraan masing-masing jenis diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Sedangkan rata-rata output per kendaraan serta rasio biaya antara diperoleh dari SKPR.

Metode penghitungan yang dipakai adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan rata-rata output per masing-masing jenis kendaraan.

7.2 Angkutan Laut

Meliputi seluruh kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui laut dengan menggunakan armada kapal laut yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran samudera, nusantara, lokal, rakyat dan pelabuhan khusus. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Data jumlah penumpang dan jumlah ton barang diperoleh langsung dari Kantor Administrator Pelabuhan, sedangkan output per penumpang dan per ton barang serta rasio biaya antara dan penyusutan dari Tabel I-O .

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Untuk harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi, dimana jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya.

7.3 Angkutan Sungai dan Danau

Mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui sungai/danau dengan menggunakan kapal/perahu, baik bermotor maupun tidak bermotor yang sifatnya melayani kegiatan umum. Jenis kendaraan sungai disini antara lain: speed boat, motor boat, motor ketek, perahu, tongkang, dan sejenisnya dimana data didapat dari LLASDP/Dinas Perhubungan. Output diperkirakan berdasarkan perkalian antara jumlah perahu/kapal dengan rata-rata output setiap

perahu/kapal. Data rata-rata output per perahu/kapal diperoleh dari SKPR, begitu juga untuk rasio biaya antara dan penyusutannya.

7.4 Angkutan Udara

Mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan. Sumber data produksi berasal dari laporan lalu lintas penerbangan Bandara Sulthan Thaha Jambi.

Penghitungan nilai tambah dihitung dengan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Perkiraan output atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ekstrapolasi, yaitu Indeks Gabungan Produksi Tertimbang produksi sebagai ekstrapolatornya.

7.5 Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan. Keegiatannya meliputi jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang baik darat maupun laut, biro perjalanan wisata, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat maupun laut, dan jasa penunjang lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku dengan mengalikan indikator produksi masing-masing kegiatan dengan indikator harganya.

Perkiraan output masing-masing kegiatan dihitung sebagai berikut:

- a. Pelabuhan laut dan Bandar Udara. Output diperoleh langsung dari laporan instansi yang bersangkutan.
- b. EMKL dan *Air Cargo Service*. Output diperkirakan dari perkalian antara ton/kg jumlah barang yang diekspedisikan dengan rata-rata output per ton/kg barang.
- c. Pergudangan dan Bongkar/Muat. Output diperkirakan dari perkalian ton barang yang digudangkan dengan rata-rata output per ton barang serta jumlah ton bongkar/muat barang dengan rata-rata output per ton.

Biaya antara dan penyusutan dari masing-masing kegiatan dihitung berdasarkan *rasio* terhadap outputnya. Output atas dasar harga konstan 2000 pada umumnya diperoleh dengan cara ekstrapolasi, dengan menggunakan perkembangan indikator produksi masing-masing sebagai ekstrapolatornya.

7.6 Komunikasi

Subsektor komunikasi ini meliputi kegiatan Pos & Giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi. Untuk kegiatan pos dan giro meliputi: pemberian jasa pos & giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan, dan sebagainya. Perkiraan output atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produksi dan pendapatan Perum Pos dan Giro se Provinsi Jambi.

Output atas dasar harga berlaku subsektor Telekomunikasi didapat dari data yang bersumber dari laporan PT Telkom Provinsi Jambi. Output atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang, yang meliputi jumlah pulsa otomatis, menit interlokal dalam negeri dan luar negeri, banyak kata telegram dan sejenisnya. Data-data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik dan PT Telkom Provinsi Jambi.

8. Sektor Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya

8.1 Subsektor Bank

Penghitungan output dan nilai tambah bruto bank atas dasar harga berlaku didapat dari Bank Indonesia. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara *Deflasi*, yaitu menggunakan indeks harga konsumen kelompok umum sebagai deflator.

8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank

8.2.1 Asuransi

Kegiatan perasuransian dibedakan menjadi asuransi jiwa, asuransi sosial serta asuransi kerugian.

Penghitungan nilai tambah bruto untuk asuransi diperoleh dari hasil SKPR. Nilai output pada umumnya didapat dengan mencari selisih antara penerimaan premi dan klaim ditambah penerimaan lainnya. Penghitungan atas dasar harga

konstan 2000 didapat dengan cara *mendeflate* nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan indeks harga konsumen kelompok lainnya.

8.2.2 Koperasi Simpan Pinjam

Penghitungan atas dasar harga berlaku diperoleh langsung dari data sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam, data ini merupakan komponen nilai tambah neto sub sektor ini. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 juga diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

8.2.3 Pegadaian

Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan Pegadaian diperoleh dari hasil olahan laporan keuangan Perum Pegadaian. Outputnya terutama terdiri dari sewa modal, bunga deposito dan lain-lain. NTB diperoleh dengan mengurangi output dengan biaya antaranya.

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara ekstrapolasi dimana jumlah nasabah sebagai ekstrapolatornya.

8.3 Penunjang Keuangan

Mencakup kegiatan pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjangnya, manajer investasi, penasihat investasi, reksa dana, biro administrasi efek, tempat penitipan harta dan sejenisnya.

8.4 Sewa Bangunan

Sewa bangunan mencakup segala kegiatan persewaan bangunan dan tanah, baik bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

Untuk perkiraan output sewa/kontrak rumah, perkiraan sewa rumah atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sewa rumah per kapita per bulan diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Pada tahun-tahun yang tidak ada Susenas, rata-rata sewa rumah per kapita per bulan dicari dengan menggerakkan indeks harga konsumen

komponen perumahan dan dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan. Penghitungan atas dasar harga konstan dengan cara ekstrapolasi.

8.5 Jasa Perusahaan

Meliputi kegiatan jasa yang pada umumnya diberikan kepada perusahaan seperti jasa hukum, jasa pengacara, notaris, akuntan, jasa arsitektur, konsultan teknik pajak, jasa pengadaan tenaga kerja, pengolahan data, periklanan, riset pemasaran, sewa menyewa mesin dan peralatan lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara indikator produksi yang berupa jumlah perusahaan/usaha ataupun tenaga kerja dengan indikator harga yang merupakan rata-rata output per perusahaan atau rata-rata output per tenaga kerjanya.

Output atas dasar harga konstan didapat dengan cara ekstrapolasi. Sumber data hasil Sensus Ekonomi dan beberapa asosiasi, sedangkan data tenaga kerja didapat dari hasil SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) dan Sakernas.

9. Jasa-Jasa

9.1 Pemerintahan Umum

Jasa pemerintahan umum pada prinsipnya terbagi atas administrasi pemerintahan & pertahanan dan Jasa pemerintahan lainnya.

9.1.1 Jasa Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

mencakup semua jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan yang diberikan oleh departemen dan non departemen, badan / lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan desa

9.1.2 Jasa Pemerintahan Lainnya

Kegiatan pemerintahan di bidang jasa sosial dan kemasyarakatan seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya serta

jasa hiburan dan rekreasi yang diberikan oleh unit-unit pemerintah yang berhubungan dengan jasa-jasa yang telah disebutkan. Jasa pemerintahan lainnya ini disebut juga sebagai jasa pemerintahan yang diberikan secara individu kepada masyarakat, seperti guru/staf pengajar di sekolah pemerintah, dokter/paramedis di rumah sakit/poliklinik/klinik/rumah bersalin pemerintah serta aparat pemerintah yang melayani penyuluhan Keluarga Berencana dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terasing, pegawai pemerintah yang menjual karcis masuk taman hiburan pemerintah, museum pemerintah atau yang melayani masyarakat di perpustakaan pemerintah.

NTB sub sektor pemerintahan umum atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai (NTN) dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah penyusutan. Data ini bersumber dari *realisasi* pengeluaran pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

9.2 Swasta

9.2.1 Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya, seperti sekolah, jasa pendidikan non formal, rumah sakit, klinik, palang merah, panti asuhan, panti jompo, rumah ibadah dan sebagainya. ***Terbatas pada yang dikelola oleh pihak swasta saja.***

Output dari subsektor ini diperoleh dari *perkalian* antara jumlah murid menurut tingkatan, jumlah tempat tidur rumah sakit/rumah bersalin, jumlah dokter dan bidan praktek, jumlah anak yang diasuh, jumlah rumah ibadah dan sebagainya, dengan rata-rata outputnya.

9.2.2 Jasa Hiburan dan Rekreasi

Kegiatan ini meliputi usaha yang dikelola **swasta** seperti: bioskop, studio radio swasta, taman bacaan serta jasa hiburan/rekreasi lainnya. Output bioskop diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah penonton dengan rata-rata harga karcis.

Sedangkan untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya umumnya merupakan hasil kali antara jumlah pengunjung dengan rata-rata output per pengunjung (Hasil SKPR).

Demikian pula rasio biaya antara dan penyusutan diperoleh berdasarkan SKPR. Untuk memperoleh output atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode ekstrapolasi dengan ekstrapolator indikator masing-masing kegiatan.

9.2.3 Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Subsektor ini mencakup kegiatan-kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga. Keegiatannya antara lain perbengkelan, reparasi, jasa perseorangan dan pembantu rumah tangga.

Output untuk masing-masing kegiatan *kecuali pembantu rumah tangga*, diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja/perusahaan dengan rata-rata output per tenaga kerja/perusahaan. Sedangkan untuk pembantu rumah tangga diperoleh dari perkalian antara rata-rata pengeluaran per kapita untuk pembantu rumah tangga (Hasil Susenas) dengan jumlah penduduk. Data biaya antara dan data penyusutan umumnya didasarkan atas rasio biaya antara dan penyusutan terhadap outputnya.

2.3. Penghitungan PDRB Menurut Penggunaan

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung berdasarkan data pokok Susenas 1999, 2002, dan 2005, data penduduk pertengahan tahun dan indeks harga konsumen. Konsumsi rumah tangga akan meliputi konsumsi seluruh rumah tangga/konsumsi penduduk Jambi ***ditambah*** perkiraan konsumsi bukan penduduk tetapi sedang melakukan perjalanan di Jambi ***dikurangi*** konsumsi penduduk Jambi yang sedang mengadakan perjalanan di luar wilayah.

Data konsumsi oleh bukan penduduk Jambi sulit diperoleh dari survei konsumsi yang biasa. Sedangkan data yang masih perlu disempurnakan adalah data konsumsi rumah tangga yang sedang berada di luar wilayah, misalnya penduduk Jambi yang mengadakan perjalanan atau menginap di luar Provinsi Jambi, membeli

premium dan sebagainya yang secara definisi dianggap sebagai produk wilayah lain (luar negeri maupun provinsi lain) yang masuk atau merupakan bagian/komponen impor Jambi.

Pada dasarnya konsumsi rumah tangga secara keseluruhan meliputi :

1. Makanan, minuman dan tembakau, baik yang dimasak di rumah ataupun makanan jadi.
2. Perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air.
3. Barang-barang dan jasa.
4. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
5. Barang-barang tahan lama.
6. Pajak pemakaian dan asuransi jiwa.
7. Pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara.

Data konsumsi rumah tangga hasil SUSENAS biasanya ditanyakan untuk periode satu minggu untuk konsumsi bahan makanan dan satu bulan untuk konsumsi bukan makanan. Untuk memudahkan estimasi selama setahun perlu adanya asumsi-asumsi:

- **Untuk konsumsi bahan makanan**

Konsumsi sebulan (dalam bulan pencacahan) diperkirakan sama dengan $30/7$ x konsumsi seminggu. Konsumsi setahun sama dengan konsumsi sebulan x rata-rata harga pada bulan - j relatif harga terhadap harga pada bulan pencacahan. Untuk lebih jelasnya kita gunakan notasi-notasi sebagai berikut:

$$C_i^b = C_i^m \times \frac{30}{7}$$

$$C_i^t = \sum_{j=1}^{12} C_i^b \times \frac{P_i^j}{P_i^o} = \sum_{j=1}^{12} \frac{C_i^b}{P_i^o} \times P_i^j = \sum_{j=1}^{12} (q_i^b \times P_i^j)$$

- C_i^m = Nilai konsumsi per kapita komoditi per minggu
 C_b^i = Nilai konsumsi per kapita komoditi i selama sebulan
 C_i^t = Nilai konsumsi per kapita komoditi i selama setahun
 P_i^o = Rata-rata harga komoditi i bulan pencacahan
 P_i^j = Rata-rata harga komoditi i pada bulan j
 q_i^b = Kuantum per kapita komoditi i selama sebulan
i = Jenis barang
j = Bulan

dimana :

Jika harga tiap komoditi pada tiap bulannya tidak diikuti sertakan sebagai penimbang, maka rata-rata perkapita komoditi i selama satu tahun dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$C_i^t = 12 \times C_b^i$$

- **Untuk konsumsi bukan makanan**

Karena data yang ditanya hanya nilainya maka perkiraan nilai konsumsi perkapita setahun cukup dengan mengalikan rata-rata relatif setelah setiap harga bulanan dibandingkan harga pada bulan pencacahan (harga konsumen).

Setelah perkiraan konsumsi rumah tangga perkapita perjenis barang untuk satu tahun diperoleh, maka perkiraan tahun-tahun lainnya yang tidak ada survei konsumsi diperkirakan dengan menghitung elastisitas konsumsi tiap jenis barang, yaitu tingkat perubahan konsumsi yang disebabkan adanya kenaikan/penurunan pendapatan.

1.1 Kelompok Makanan

Beberapa asumsi yang dijadikan dasar dalam menentukan elastisitas konsumsi antara lain :

- ✓ Untuk barang-barang yang sifatnya superior, seperti makanan dalam kaleng, susu, margarine dan sebagainya, akan memiliki koefisien elastisitas positif karena konsumsi barang tersebut akan cenderung meningkat bila pendapatan meningkat.
- ✓ Untuk barang - barang inferior seperti gaplek, ubi kayu, jagung, ikan asin dan sebagainya, akan cenderung turun/mengecil apabila pendapatan naik, sehingga koefisien elastisitas konsumsinya negatif.

Berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, namun pada suatu saat akan mencapai titik jenuh sehingga konsumsi tersebut mulai menurun, maka untuk mendapatkan besarnya koefisien elastisitas (b) digunakan bentuk eksponensial, yaitu :

$$Q = a (Y^b)$$

dimana

Q = Rata-rata konsumsi perkapita / bulan (kuantum)

Y = Pendapatan perkapita

a = Konstanta

b = Koefisien elastisitas

Konsumsi perkapita/bulan = konsumsi perkapita/minggu dikali 30/7

Karena data pendapatan tidak tersedia maka yang digunakan adalah data pengeluaran (pendekatan pengeluaran), yang didapatkan dari total pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan dan bukan makanan yang bersumber dari Susenas.

Untuk menyederhanakan, persamaan eksponensial tersebut diturunkan dalam bentuk logaritma, sebagai berikut :

$$\text{Log } Q = \text{Log } a + b \text{ Log } y$$

Elastisitas yang dicari adalah koefisien arah (b) dari garis regresi tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi non makanan variabel konsumsinya (Q) dalam bentuk nilai (rupiah). Dengan demikian konsumsi pada tahun-tahun lainnya dapat diestimasi dengan formula berikut ini :

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(d_{p,t})(C_n)\}$$

Di mana :

$C_{(n+1)}$ = Rata-rata konsumsi per kapita setahun pada tahun ke (n+1) dalam bentuk kuantum (untuk kelompok makanan)

C_n = Rata-rata konsumsi per kapita setahun pada tahun dasar (n) dalam bentuk kuantum (untuk kelompok makanan); data Susenas

(b) = koefisien elastisitas

($d_{p,t}$) = Perubahan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan, tahun ke n dengan tahun ke (n+1)

Berdasarkan formulasi tersebut di atas maka perlu diasumsikan bahwa konsumsi per kapita dipengaruhi oleh besarnya koefisien elastisitas (b) atau tingkat kecenderungan untuk mengkonsumsi suatu jenis komoditi, dan persentase perubahan pendapatan.

Nilai konsumsi bahan makanan atas dasar harga berlaku diperoleh dari kuantum per jenis komoditi dengan harga rata-rata eceran pada masing-masing tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan 12 (bulan) dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sedangkan untuk menghitung nilai konsumsi atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan cara revaluasi, yaitu kuantum per jenis komoditi pada tahun yang bersangkutan dikalikan dengan harga tetap pada tahun dasar (2000), dikalikan dengan 12 dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.2 Kelompok Bukan Makanan

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga kelompok bukan makanan digunakan bentuk persamaan/fungsi linier, dengan asumsi bahwa konsumsi untuk komoditi bukan makanan tidak pernah sampai pada titik jenuh.

Perbedaan persamaan ini dengan persamaan yang digunakan untuk estimasi komoditi makanan terletak pada satuan yang digunakan. Persamaan yang digunakan dalam memperkirakan elastisitas kelompok bukan makanan yaitu :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Rata-rata pengeluaran per kapita per komoditi bukan makanan sebulan

a = konstanta

b = koefisien elastisitas

X = Pendapatan per kapita sebulan

Dalam estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita atas dasar harga konstan, digunakan rata-rata pengeluaran per kapita (C_n) yang bersumber dari Susenas dideflasikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan masing-masing kelompok jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. Untuk keperluan ini, sebelumnya tahun dasar indeks harus disesuaikan dengan tahun dasar yang dipakai dalam penghitungan PDRB.

Untuk memperkirakan konsumsi tahun lainnya digunakan formulasi yang sama dengan komoditi makanan, yaitu :

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(d_{pt})(C_n)\}$$

Dimana :

$C_{(n+1)}$ = Rata-rata pengeluaran per kapita setahun pada tahun ke (n+1) dalam bentuk rupiah (untuk kelompok bukan makanan)

C_n = Rata-rata konsumsi per kapita setahun pada tahun dasar (n) dalam bentuk rupiah (untuk kelompok bukan makanan); data Susenas

Dengan formulasi ini didapatkan nilai konsumsi per kapita sebulan atas dasar harga konstan. Konsumsi perkapita setahun diperoleh dengan mengalikan konsumsi per kapita sebulan atas dasar harga konstan dengan 12 (bulan) dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku didapat dari perkalian total nilai konsumsi atas dasar harga konstan dengan indeks harga konsumen (IHK), sesuai dengan kelompok jenis barang dan jasa yang dikonsumsi.

2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang khusus melayani masyarakat tanpa adanya motivasi mencari untung.

Dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan, yang termasuk dalam lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) lembaga. yaitu :

1. Organisasi Kemasyarakatan, seperti : Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI, HMI, Kosgoro, MKGR, Kowani, KNPI dan sebagainya.
2. Organisasi Sosial, seperti : Panti Asuhan, Panti Wreda, Panti Rehabilitasi Cacat baik cacat mental maupun fisik.
3. Organisasi Profesi, seperti : IDI, ISEI, Ikatan Statistik Indonesia dan sebagainya.
4. Perkumpulan Sosial/Budaya/Olahraga & Hobi, seperti : Perkumpulan Rotari Indonesia, Padepokan Seni Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Penggemar Anggrek Indonesia, RAPI, ORARI dan sebagainya.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti : Lembaga Studi Pembangunan, YLKI, Walhi, YLBHI, Yayasan Dian Desa, Lembaga Pengkajian Strategi Indonesia, dsb.
6. Lembaga Keagamaan, seperti : Pondok Pesantren, Gereja, Masjid, PGI, KWI, Walubi, Parisadha Hindu Dharma Indonesia dan sebagainya.
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa, seperti : Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Bimantara, Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Gerakan Nasional Orangtua Asuh dan sebagainya.

Perkiraan pengeluaran konsumsi kelompok ini meliputi output jasa sosial kemasyarakatan menurut lapangan usaha yang dikumpulkan dari tujuh lembaga swasta nirlaba diatas.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Yang dimaksud dengan konsumsi pemerintah adalah semua pengeluaran konsumsi untuk menjalankan kegiatan administrasi pemerintah dan pertahanan, tidak termasuk disini pengeluaran konsumsi oleh perusahaan milik pemerintah karena perusahaan milik pemerintah tersebut telah dimasukkan kedalam kelompok usaha masing-masing seperti: Perum, Perjan, Persero, PN, PD dan sebagainya.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dimaksud adalah pengeluaran yang sifatnya habis dipakai dalam proses produksi setelah dikurangi dengan penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah), termasuk pengeluaran pertahanan dan keamanan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terdiri dari:

- ❖ Pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai baik untuk Pegawai Negeri Sipil maupun ABRI, termasuk honor, bonus, lembur, pensiun, pembelian pakaian dinas dan lain-lain belanja pegawai baik yang berbentuk uang maupun barang.

- ❖ Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi seperti belanja perjalanan pegawai, biaya perbaikan kendaraan dinas, perbaikan kantor dan rumah dinas, pembelian alat-alat tulis serta perbaikan alat inventaris dan sebagainya termasuk juga disini pembelian barang modal untuk pertahanan dan keamanan.
- ❖ Penyusutan di sektor pemerintah meliputi penyusutan terhadap gedung, mesin-mesin dan peralatannya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Data yang dipergunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah adalah bersumber dari laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sedangkan mengenai Pengeluaran Keuangan Daerah Tingkat I, II dan desa diperoleh dari hasil pengolahan daftar K1, K2 dan K3 masing-masing tahun anggaran.

Pada daftar realisasi penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, masing-masing terdiri dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur daerah adalah bagian belanja administrasi umum; belanja operasional dan pemeliharaan; dan belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Sedangkan belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi & pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Pengeluaran pemerintah sebagian besar diperoleh dari belanja aparatur daerah yang terdiri dari:

- ❖ Belanja Administrasi umum adalah belanja tidak langsung dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset). Belanja administrasi umum terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.
- ❖ Belanja operasi dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset). Belanja ini

terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.

- ❖ Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

Penjumlahan dari belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan perbaikan dinas dan sebagainya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pertahanan adalah merupakan konsumsi pemerintah Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku.

Sedangkan untuk memperoleh nilai konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi yaitu mendeflasikan nilai atas dasar harga berlaku dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen Umum sebagai deflator untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar bahan bangunan sebagai deflator.

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah, yang digunakan untuk memproduksi didalam negeri/wilayah tersebut. Kategori barang modal yaitu barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang modal sebagai alat yang tetap dalam memproduksi.

Menurut wujudnya pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup 5 (lima) hal :

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi, seperti:
 - ✓ bangunan tempat tinggal
 - ✓ bangunan bukan tempat tinggal

- ✓ bangunan atau konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas & air serta monumen.
 - ✓ perbaikan besar-besaran dari bangunan yang disebutkan di atas.
 - ✓ Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan, yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.
2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan, terdiri dari:
 - ✓ alat-alat transportasi seperti : kapal laut, kapal terbang, kereta api, bus, truk, dan motor.
 - ✓ mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian, listrik, pertambangan, pembuatan jalan, jembatan, perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, dll. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang masih dalam proses pembuatan tidak termasuk dalam pembentukan modal, melainkan merupakan Stok dari produsennya.
 3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Tanaman keras yang dimaksud di sini adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih.
 4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya atau bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
 5. Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap.

Secara umum barang modal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Mempunyai umur kegunaan lebih dari satu tahun, sehingga mempunyai nilai penyusutan.
- Pengeluaran untuk barang modal mempunyai manfaat/hasil pada masa yang akan datang dalam jangka waktu yang relatif panjang.

- Nilai per unit dari barang modal relatif besar dibandingkan dengan output sektor yang memakainya.

5. Perubahan Stok

Stok merupakan persediaan barang, baik berasal dari pembelian, yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi.

Pemegang stok tersebut adalah produsen, pedagang dan pemerintah. Stok pemerintah merupakan barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan waktu kritis. Alat berat seperti kapal dan pesawat merupakan stok bagi pihak produsen. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan tidak termasuk stok, melainkan merupakan pembentukan modal tetap bruto.

Apabila semua stok akhir tahun yang ada pada produsen, pedagang dan pemerintah tersebut dikurangi dengan stok awal tahunnya, maka akan diperoleh perubahan stok untuk tahun yang bersangkutan.

Estimasi yang digunakan untuk menilai besarnya perubahan stok, sampai saat ini belum ada metode yang paling tepat, sebab data jumlah stok belum tersedia secara lengkap. Nilai perubahan stok dalam komponen penggunaan PDRB ini masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi dengan penggunaan untuk komponen permintaan akhir lainnya (merupakan sisa/residual).

Dengan demikian, nilai perubahan stok atas dasar harga berlaku dalam penghitungan ini diperoleh dari hasil pengurangan antara PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dengan komponen penggunaan PDRB lainnya (konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor netto).

Perubahan stok atas dasar harga konstan 2000 didapat dengan cara yang sama, yaitu merupakan selisih PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan total komponen penggunaan PDRB lainnya.

6. Ekspor Dan Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain termasuk dengan negara lain, baik melalui udara, laut dan darat. Ekspor dan impor tersebut meliputi barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi dan berbagai jasa lainnya. Ekspor barang dinilai dengan harga f.o.b (*free on board*) sedangkan impor jasa dinilai dengan harga c.i.f (*cost of insurance, and freight*). Ekspor dinilai pada saat barang tersebut diberikan ke bukan penduduk domestik, sedangkan impor dinilai pada saat barang tersebut diterima oleh penduduk. Termasuk dalam kegiatan ekspor adalah pembelian langsung barang dan jasa di wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut.

Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor masih sangat terbatas. Data ekspor dan impor antar negara untuk Provinsi Jambi bersumber dari laporan publikasi Ekspor-Impor yang diterbitkan BPS, sedangkan untuk antar pulau diperkirakan dari jumlah (ton) arus barang yang dikalikan dengan rata-rata harga per ton barang. Kuantum barang antar pulau melalui laut bersumber dari Pelabuhan Jambi, Muara Sabak, Kuala Tungkal, dan Nipah Panjang. Untuk transaksi barang lewat darat, penghitungan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan jembatan timbang. Data statistik arus lalu lintas barang yang dicatat pada jembatan timbang merupakan informasi yang cukup penting didalam membantu memperkirakan nilai ekspor dan impor barang melalui darat.

Adanya kebijakan pemerintah untuk menutup jembatan timbang mengakibatkan sulitnya memperkirakan nilai ekspor dan impor barang lewat darat. Untuk menanggulangi hal ini perlu dilakukan survei khusus lalu lintas barang lewat darat antar daerah/provinsi. Sepanjang data lalu lintas barang lewat darat antar daerah/provinsi belum tersedia, perkiraan ekspor dan impor barang lewat darat dapat dihitung sebagai residual. Untuk memperoleh nilai ekspor dan impor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode deflasi. Sebagai deflator digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang ekspor dan impor per komoditi atau kelompok komoditi.

2.4. Mengukur Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah dengan Indeks Williamson

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Williamson dalam Sjafrizal (2008) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan negara berkembang. Ternyata ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Indeks ketimpangan regional menggambarkan ketimpangan kabupaten/kota di suatu provinsi tertentu dengan formulasi sebagai berikut :

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

I_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita di Kabupaten i

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata Provinsi Jambi

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten i

n = Jumlah penduduk di Provinsi Jambi

Indeks Williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar. Para ahli menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan ada pada taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu, ditentukan kriteria sebagai berikut:

- a. ketimpangan taraf rendah, bila indeks ketimpangan kurang dari 0,35
- b. ketimpangan taraf sedang, bila indeks ketimpangan 0,35-0,5
- c. ketimpangan taraf tinggi, bila indeks ketimpangan lebih dari 0,5

2.5. Klassen Typology

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan klasifikasi tiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda yaitu:

- a. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
- b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (*low growth but high income*) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
- c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.
- d. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

Tabel 2.1. Klasifikasi Wilayah Menurut Klassen Typologi

	$Y_{ij} < \bar{Y}_j$	$Y_{ij} > \bar{Y}_j$
$Y_{ij} > \bar{Y}_j$	Kuadran III Daerah berkembang cepat	Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat
$R_{ij} < \bar{R}_j$	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal	Kuadran II Daerah Maju tapi tertekan

Keterangan:

R_{ij} = Laju pertumbuhan PDRB ADHK tiap kabupaten/kota

\bar{R}_j = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jambi

Y_{ij} = Pendapatan per kapita tiap kabupaten/kota

\bar{Y}_j = rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jambi

BAB III

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Gambaran mengenai perkembangan taraf kesejahteraan rakyat dapat ditinjau dari perspektif obyektif dan subyektif. Perspektif obyektif didasarkan pada ukuran atau indikator yang dapat mengidentifikasi status kesejahteraan rakyat tanpa melibatkan persepsi responden. Persepsi subyektif didasarkan pada pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perubahan taraf hidup dan kesejahteraan yang mereka rasakan dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan perpektif obyektif disusun PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan perekonomian Provinsi Jambi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedang harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

3.1. PDRB dan Perkembangannya

PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2010 sebesar Rp. 53.816,69 miliar sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 17.465,25 miliar. Berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 berkembang 5,6 kali lebih besar dibandingkan tahun 2000. Berdasarkan harga konstan PDRB Provinsi Jambi berkembang 1,8 kali lebih besar dibandingkan tahun 2000.

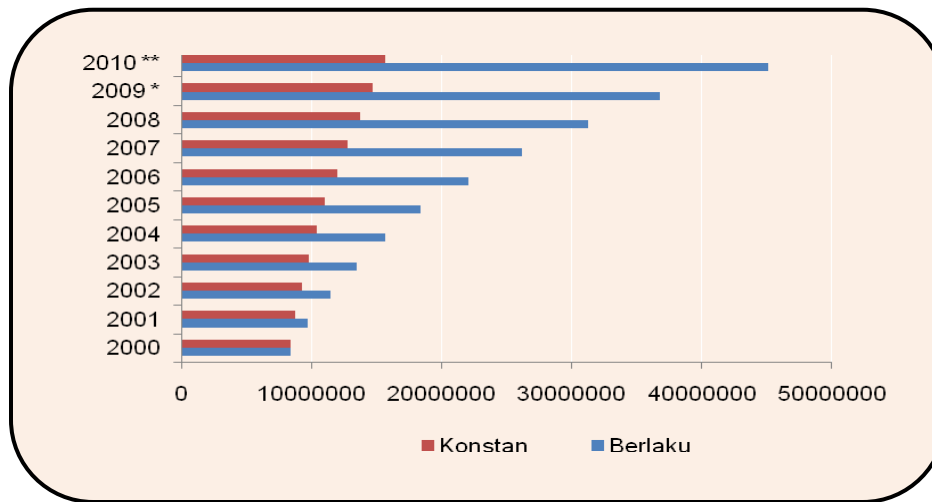
**Tabel 3.1 PDRB ADHB, ADHK 2000 dan indeks Perkembangan
di Provinsi Jambi Tahun 2000-2010 (Dengan Migas)**

Tahun	ADHB		ADHK 2000	
	PDRB (Juta Rupiah)	Perkembangan	PDRB (Juta Rupiah)	Perkembangan
2000	9.569.242	100,00	9.569.242	100,00
2001	11.531.784	120,51	10.205.592	106,65
2002	13.940.538	145,68	10.803.423	112,90
2003	15.928.521	166,46	11.343.280	118,54
2004	18.487.944	193,20	11.953.885	124,92
2005	22.487.011	234,99	12.619.972	131,88
2006	26.061.774	272,35	13.363.621	139,65
2007	32.076.677	335,21	14.275.161	149,18
2008	41.056.484	429,05	15.297.771	159,86
2009	44.127.006	461,13	16.274.908	170,08
2010	53.816.693	562,39	17.465.253	182,51

**Tabel 3.2 PDRB ADHB, ADHK 2000 dan indeks Perkembangan
di Provinsi Jambi Tahun 2000-2010 (Tanpa Migas)**

Tahun	ADHB		ADHK 2000	
	PDRB (Juta Rupiah)	Perkembangan	PDRB (Juta Rupiah)	Perkembangan
2000	8.431.224	100,00	8.431.224	100,00
2001	9.711.074	115,18	8.724.131	103,47
2002	11.513.584	136,56	9.264.356	109,88
2003	13.452.425	159,55	9.778.185	115,98
2004	15.666.192	185,81	10.411.851	123,49
2005	18.403.956	218,28	11.062.278	131,21
2006	22.080.155	261,89	11.985.807	142,16
2007	26.193.641	310,67	12.775.067	151,52
2008	31.271.224	370,90	13.716.456	162,69
2009	36.755.123	435,94	14.675.262	174,06
2010	45.092.786	534,83	15.672.008	185,88

**Grafik 3.1 Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Jambi (Dengan Migas)**



3.2. Struktur Ekonomi

Distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. Sampai tahun 2010, sektor pertanian masih mendominasi sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jambi. Walaupun sempat pada tahun 2008 sektor Pertambangan dan Penggalian menggeser peran sektor Pertanian. Pada tahun 2010 ini peran sektor Pertanian 29,56 persen. Sub sektor Tanaman Perkebunan memberi sumbangannya tertinggi terhadap sektor ini setiap tahunnya, dari tahun 2006 hingga tahun 2010 sumbangannya berturut-turut : 13,16 persen (tahun 2006), 12,24 persen (tahun 2007), 11,27 persen (tahun 2008), 13,35 persen (tahun 2009) dan 16,00 persen pada tahun 2010 .

Sektor penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Jambi adalah Pertambangan dan Penggalian dengan peranannya sebesar 18,12 persen di tahun 2010. Sub sektor Minyak dan Gas Bumi memberi sumbangannya tertinggi yaitu 15,18 persen terhadap sektor ini.

Sektor-sektor lain juga tak kalah pentingnya dalam menyumbang PDRB Provinsi Jambi dan peranannya pun cukup signifikan. Seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2010 berperan sebesar 14,54 persen sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB.

Peranan sektor Industri Pengolahan pada tahun 2010 menduduki tempat keempat setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Peranan sektor Industri Pengolahan tahun 2010 sebesar 11,11 persen.

Sektor Jasa-jasa berperan sebesar 9,56 persen; sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,54 persen. Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang pada tahun 2010 pertumbuhannya sangat tinggi (12,12 persen), peranannya hanya sebesar 5,14 persen terhadap PDRB. Selanjutnya peranan sektor bangunan sebesar 4,55 persen.

Sektor Listrik dan air bersih memberi kontribusi terkecil dalam PDRB Provinsi Jambi, yakni 0,89 persen, meski demikian sub sektor ini merupakan penunjang sektor-sektor lainnya.

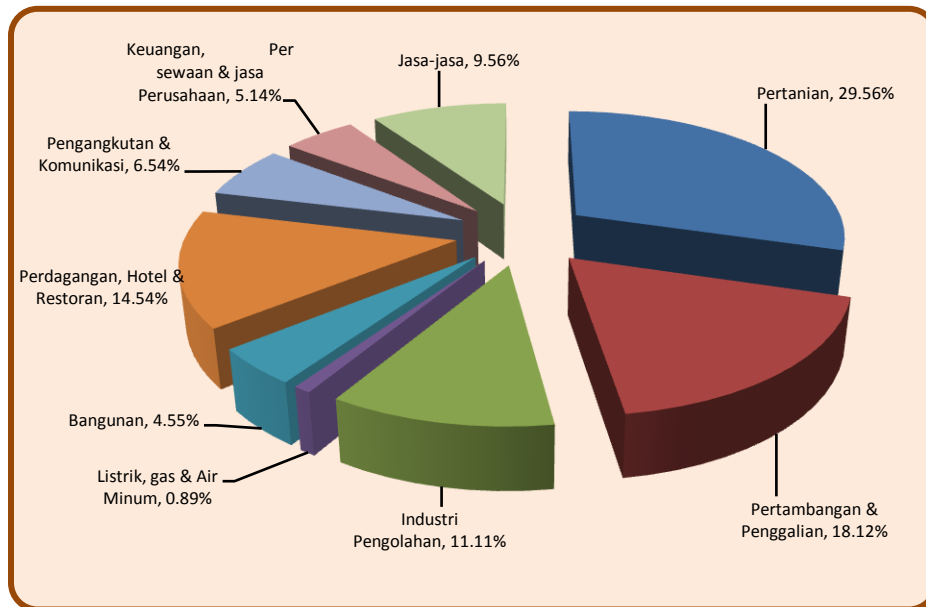
Sumbangan sektor ekonomi tanpa migas terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2010, ternyata di atas 80% walaupun sempat di bawah 80% pada tahun 2009. Pada tahun 2006 sebesar 84,72 persen, kemudian menurun pada tahun 2007 menjadi sebesar 81,66 persen, tahun 2008 turun menjadi sebesar 76,17 persen, tahun 2009 naik menjadi 83,29 persen dan pada tahun 2010 menjadi 83,79 persen.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Provinsi Jambi selama periode 2000-2010 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan grafik 3.2 berikut :

**Tabel 3.3 Struktur Perekonomian Provinsi Jambi
Tahun 2000–2010**

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	32,18	30,55	29,84	29,69	28,75	26,92	27,53	26,08	23,85	27,45	29,56
2	Pertambangan & Penggalian	12,46	16,34	17,28	15,66	15,65	18,07	15,86	18,96	25,64	18,31	18,12
3	Industri Pengolahan	14,72	14,27	13,82	12,73	12,41	12,02	11,94	11,86	11,13	11,92	11,11
4	Listrik dan Air Bersih	0,57	0,59	0,74	0,98	1,03	0,97	1,01	0,90	0,80	0,83	0,89
5	Bangunan	2,14	2,02	2,58	3,31	3,93	4,36	4,56	4,59	4,32	4,86	4,55
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	16,82	16,38	15,92	15,35	15,08	15,29	16,37	14,88	13,76	14,57	14,54
7	Angkutan & Komunikasi	7,83	7,63	7,19	7,08	6,88	7,16	7,57	7,31	6,34	6,89	6,54
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,81	3,23	3,17	3,80	4,26	3,99	3,90	4,25	4,40	5,17	5,14
9	Jasa-jasa	9,48	8,99	9,47	11,40	12,01	11,22	11,26	11,16	9,77	10,00	9,56
PDRB Dengan Migas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas		88,11	84,21	82,59	84,45	84,74	81,84	84,72	81,66	76,17	83,29	83,79

Grafik 3.2 Struktur Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2010



3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000, dari tahun 2000 hingga tahun 2010 rata-rata pertumbuhannya 6,20 persen pertahun. Secara runtun pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2006 sebesar 5,89 persen; pada tahun 2007 sebesar 6,82 persen; pada tahun 2008 sebesar 7,16 persen; pada tahun 2009 sebesar 6,39 persen dan 7,31 persen pada tahun 2010.

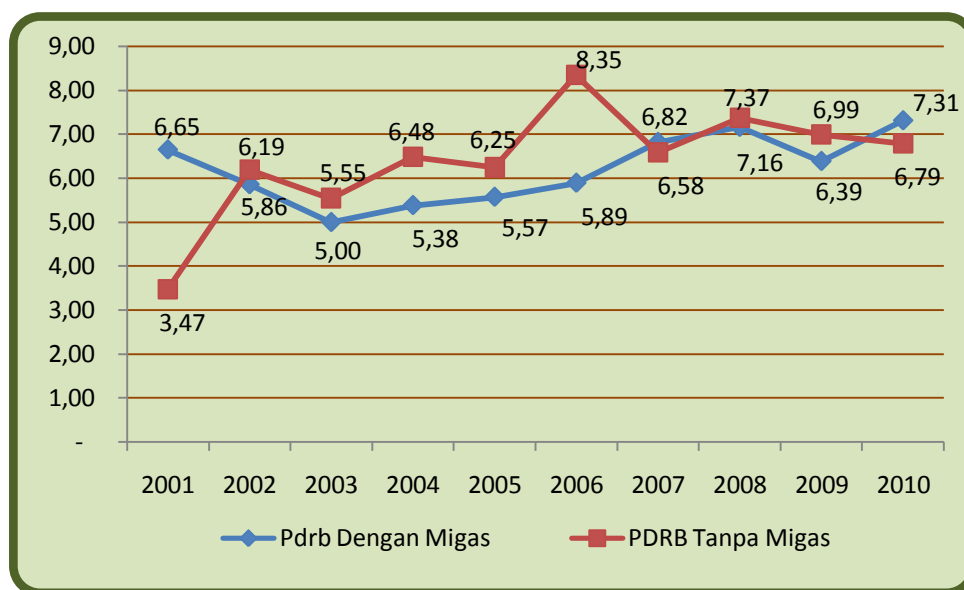
Di lihat dari sektor-sektornya, pada tahun 2010 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi, dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 14,46 persen. Sektor lainnya masing-masing tumbuh sebagai berikut: sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 13,12 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 12,12 persen; sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mampu tumbuh sebesar 10,16 persen, sektor Bangunan sebesar 6,76 persen; sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 5,12 persen; sektor Industri Pengolahan sebesar 4,49 persen; sektor Jasa-jasa 4,05 persen; dan sektor Angkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 3,99 persen.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi tanpa migas pada tahun 2010 sebesar 6,79 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB non migas selama kurun waktu 2000–2010 adalah 6,40 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2001 - 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan grafik 3.3.

**Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
Tahun 2001 – 2010**

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	4,85	3,56	5,08	4,61	11,34	4,57	5,72	6,66	5,12	5,12
2	Pertambangan & Penggalian	(1,52)	2,82	0,65	1,04	(7,29)	9,60	14,70	1,29	14,46	14,46
3	Industri Pengolahan	10,09	2,36	3,55	3,90	4,44	5,45	5,63	3,84	4,49	4,49
4	Listrik dan Air Bersih	16,05	22,10	13,03	5,10	7,38	4,47	7,28	9,27	13,12	13,12
5	Bangunan	33,98	26,79	25,75	20,48	6,67	14,58	10,28	8,45	6,76	6,76
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,67	6,32	6,03	9,04	7,90	6,25	3,99	7,88	10,16	10,16
7	Angkutan & Komunikasi	5,36	4,94	6,47	7,10	5,94	7,14	3,37	5,81	3,99	3,99
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,13	13,98	14,38	8,42	5,77	19,06	23,88	17,85	12,12	12,12
9	Jasa-jasa	9,67	4,82	3,48	3,21	4,07	5,62	4,99	6,24	4,05	4,05
PDRB Dengan Migas		6,65	5,86	5,00	5,38	5,57	5,89	6,82	7,16	6,39	7,31
PDRB Tanpa Migas		3,47	6,19	5,55	6,48	6,25	8,35	7,37	6,99	6,99	6,79

Grafik 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2001-2010 (persen)



3.3.1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor Pertanian yang mencakup sub sektor tanaman bahan makanan (tabama), tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Sepuluh tahun terakhir, sub sektor tanaman perkebunan mendominasi sektor pertanian, rata-rata kontribusinya sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 berkisar 12,49 persen lebih tinggi dari sub sektor tabama yang peranannya rata-rata sekitar 9,92 persen. Pertumbuhan sub sektor tabama di tahun 2010 sebesar 3,92 persen, sementara Sub sektor tanaman perkebunan sebesar 6,90 persen.

Laju pertumbuhan sub sektor peternakan dari 6,42 persen di tahun 2009 naik menjadi 5,68 persen pada tahun 2010. Sedangkan subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan minus 3,11 persen, kemudian sub sektor perikanan tumbuh 5,24 persen pada tahun 2010, dimana tahun sebelumnya tumbuh 8,57 persen. Peranan tiga sub sektor ini jauh lebih kecil dibandingkan sub sektor tabama dan tanaman perkebunan.

3.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalan

Sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor paling dominan kedua dalam perekonomian di Provinsi Jambi pada tahun 2010, terutama untuk migas yang menjadi andalan di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sektor pertambangan dan penggalan mengalami pertumbuhan sebesar 14,46 persen pada tahun 2010. Laju pertumbuhan yang relatif tinggi ini ditunjang oleh subsektor minyak dan gas bumi yang tumbuh positif yaitu sebesar 12,07 persen, dan sub sektor penggalan tumbuh sebesar 36,83 persen. Naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan yang sangat tinggi memberikan dampak dalam peranan sektor pertambangan dan penggalan yang menempati tempat kedua dalam sumbangannya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 18,12 persen. Padahal pada tahun 2008 dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar 14,70 persen, sektor ini sempat menggeser sektor pertanian dan menempati posisi pertama dalam sumbangannya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 25,64 persen. Dalam pembentukan PDRB, sektor pertanian dan sektor

pertambangan / penggalian disebut sebagai sektor primer. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

**Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Sektor Primer
(Pertanian dan Pertambangan) Tahun 2000 – 2010**



3.3.3. Sektor Industri Pengolahan

Tahun 2010 industri migas tumbuh sebesar 12,55 persen. Sedangkan industri non migas pertumbuhannya mencapai 4,04 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,18 persen.

Secara umum peranan sektor industri pengolahan pada tahun 2010 sebagian besar disumbang oleh industri non migas sebesar 10,08 persen. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

3.3.4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

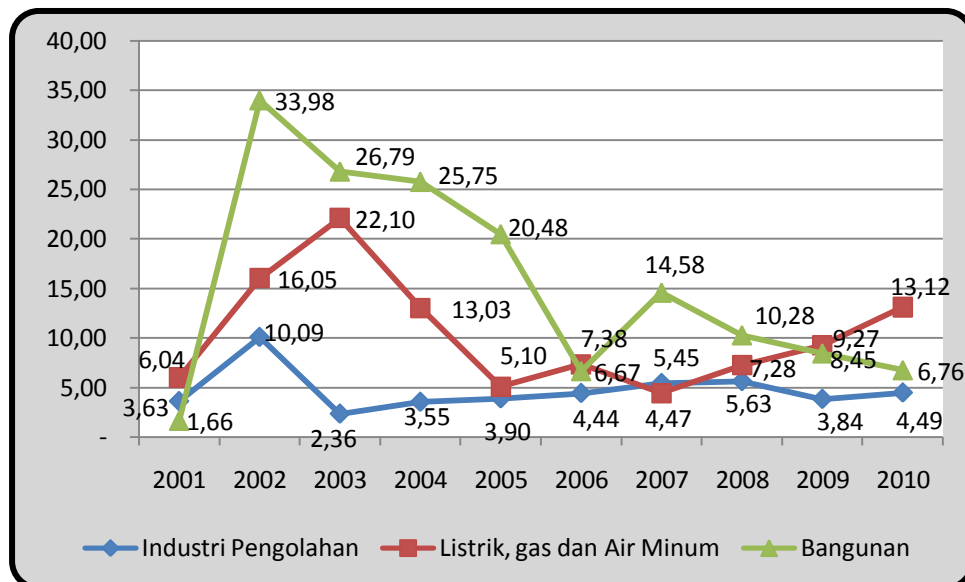
Sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 13,12 persen pada tahun 2010 dimana tahun sebelumnya (tahun 2009) tumbuh sebesar 9,27 persen. Peranan sektor ini masih terlalu kecil namun kebutuhan akan sektor ini dalam pembentukan perekonomian Provinsi Jambi sangat penting sebagai sektor

penunjang kegiatan bagi sektor-sektor lainnya. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

3.3.5. Sektor Bangunan

Meningkatnya situasi perekonomian secara jelas terlihat pada sektor bangunan. Sejak tahun 2003 sektor ini terus mengalami pertumbuhan yang cepat hingga tahun 2005. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan sektor bangunan mengalami perlambatan yakni berkisar 6,67 persen, tapi ditahun 2007 naik kembali menjadi 14,58 persen. Kemudian melambat kembali menjadi 10,28 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 melambat menjadi 8,45 persen. Pada tahun 2010 laju sektor ini kembali melambat menjadi 6,76 persen. Peranan sektor bangunan terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2010 baru mencapai 4,55 persen. Sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan, dalam pembentukan PDRB disebut sebagai sektor sekunder. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

**Grafik 3.5 Laju Pertumbuhan Sektor Sekunder
(Industri, Listrik, dan Bangunan) Tahun 2001 – 2010**



3.3.6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 10,16 persen pada tahun 2010 sementara di tahun 2009 tumbuh sebesar 7,88 persen. Dilihat dari subsektor yang membentuk sektor ini, laju pertumbuhan subsektor hotel mengalami laju pertumbuhan tertinggi yaitu 18,02 persen setelah sebelumnya, pada tahun 2009, tumbuh sebesar 5,35 persen. Begitu juga dengan subsektor perdagangan besar dan eceran mengalami laju pertumbuhan 10,53 persen pada tahun 2010 lebih cepat dari tahun 2009 yang tumbuh sebesar 8,40 persen. Sedangkan subsektor restoran hanya mampu melaju sebesar 3,54 persen dimana tahun sebelumnya tumbuh sebesar 2,03 persen.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran ini berperan sebagai penunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Jambi yang menghasilkan produk barang dan jasa. Sumbangan sektor ini terhadap PDRB pada tahun 2010 mencapai 14,54 persen. Proporsi terbesar sektor ini disumbang oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,37 persen. Kemudian sub sektor restoran berperan 0,97 persen, dan sub sektor hotel memberikan andil sebesar 0,21 persen. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

3.3.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Dalam era globalisasi, peranan sektor pengangkutan dan komunikasi sangat vital dan menjadi indikator kemajuan Provinsi Jambi, terutama jasa telekomunikasi. Sub sektor transportasi sendiri memiliki peran sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas perekonomian di Jambi.

Penyumbang terbesar terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2010 ini masih dikuasai sub sektor angkutan sebesar 6,01 persen. Sub sektor komunikasi tak kalah penting peranannya, tapi andilnya masih terlihat kecil yaitu 0,53 persen.

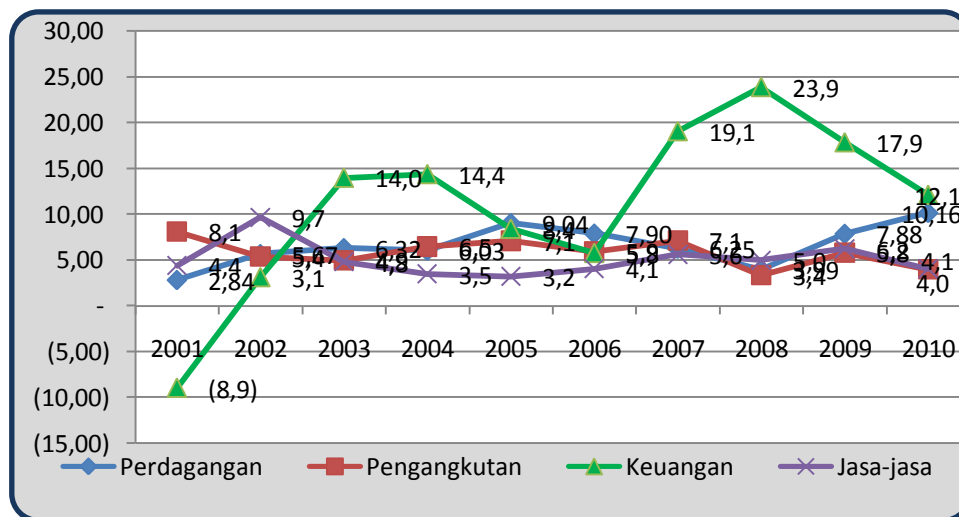
Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2010 tumbuh sebesar 3,99 persen, melambat dibanding pertumbuhan tahun 2009 yang tumbuh sebesar 5,81 persen. Subsektor angkutan udara laju pertumbuhannya terbesar di sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 14,21 persen. Sub sektor angkutan

jalan raya tumbuh sebesar 2,71 persen lebih lambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,85 persen. Sub sektor angkutan laut dan angkutan sungai, masing-masing tumbuh sebesar 1,89 persen dan 1,81 persen. Disisi lain pesatnya bisnis telekomunikasi yang ditandai dengan banyaknya pengguna telepon seluler di Provinsi Jambi, mengakibatkan sub sektor komunikasi mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,25 persen, sedikit lebih lambat jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2009 yang sebesar 6,96 persen. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

3.3.8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan 12,12 persen pada tahun 2010. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah bertambahnya kantor bank dan tumbuhnya lembaga-lembaga pembiayaan sampai ke kabupaten di Provinsi Jambi. Peranan Sektor ini pada tahun 2010 hanya sebesar 5,14 persen, masing-masing disumbang oleh sub sektor bank sebesar 2,22 persen; lembaga keuangan bukan bank sebesar 0,34 persen; jasa penunjang keuangan sebesar 0,02 persen; sewa bangunan sebesar 2,48 persen serta andil dari sub sektor jasa perusahaan sebesar 0,08 persen. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

**Grafik 3.6 Laju Pertumbuhan Sektor Tersier
(Perdagangan, Angkutan, Keuangan & Jasa-jasa)
Tahun 2001 – 2010**



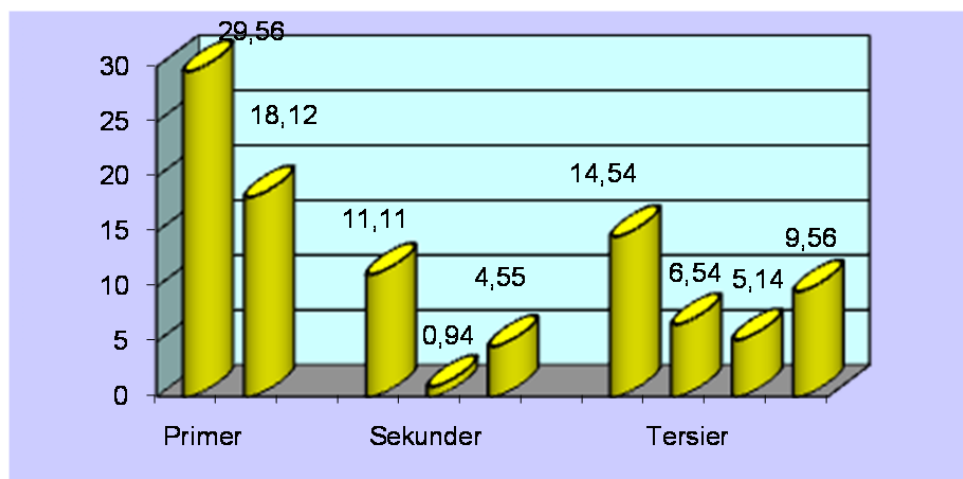
3.3.9. Sektor Jasa-Jasa

Laju pertumbuhan di sektor jasa-jasa tahun 2010 yang sebesar 4,05 persen, telah memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 9,56 persen dan masih menempati urutan kelima dari sembilan sektor. Kontribusi terbesar sub sektor ini disumbang oleh kegiatan pemerintahan umum sebesar 8,18 persen dan sisanya sebesar 1,37 persen disumbang oleh pihak swasta.

Melihat pertumbuhannya, sektor jasa-jasa pada tahun 2010 tumbuh sebesar 4,05 persen sedangkan pada tahun 2009 tumbuh sebesar 6,24 persen. Subsektor sosial kemasyarakatan merupakan sub sektor dengan laju tertinggi 4,84 persen, diikuti oleh subsektor jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan dengan laju pertumbuhan sebesar 4,15 persen serta subsektor jasa pemerintahan lainnya sebesar 3,70 persen, jasa perorangan dan rumah tangga sebesar 3,50 persen dan jasa hiburan dan rekreasi laju pertumbuhannya sebesar 3,31 persen. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa, selanjutnya disebut sektor tersier. (Lihat Lampiran Tabel 3 untuk kontribusi dan Tabel 5 untuk laju Pertumbuhan)

Berikut gambaran peranan sektor primer, sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi :

**Grafik 3.7 Peranan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier
Tahun 2010**



3.4. Sumber Pertumbuhan

Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, sektor pertanian menempati urutan pertama yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Sumber pertumbuhan sektor pertanian tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 3,42 yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang terendah tahun 2003 dan hanya tahun 2001 menduduki peringkat kedua setelah sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2010 sektor pertanian menempati urutan ketiga sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan pertumbuhan sebesar 1,58.

Tabel 3.5 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2001-2010

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Pertanian	1,19	1,52	1,10	1,55	1,40	3,42	1,45	1,78	2,04	1,58
2. Pertambangan & Penggalian	3,66	(0,23)	0,40	0,09	0,14	(0,92)	1,06	1,66	0,16	1,67
3. Industri Pengolahan	0,53	1,44	0,35	0,51	0,56	0,62	0,75	0,77	0,52	0,59
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,03	0,09	0,14	0,09	0,04	0,06	0,04	0,06	0,07	0,10
5. Bangunan	0,04	0,69	0,69	0,80	0,76	0,28	0,62	0,47	0,40	0,33
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,48	0,92	1,02	0,99	1,49	1,35	1,08	0,69	1,32	1,73
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,63	0,43	0,39	0,51	0,57	0,48	0,58	0,27	0,46	0,31
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	(0,34)	0,10	0,44	0,49	0,31	0,22	0,73	1,02	0,88	0,66
9. Jasa-Jasa	0,42	0,90	0,46	0,33	0,30	0,37	0,51	0,45	0,55	0,35
PDRB dengan Migas	6,65	5,86	5,00	5,38	5,57	5,89	6,82	7,16	6,39	7,31
PDRB Tanpa Migas	3,06	5,29	4,76	5,59	5,44	7,32	5,91	6,59	6,27	6,12

Pada tahun 2007, produksi batubara di beberapa kabupaten mulai meningkat sehingga sektor pertambangan memberikan sumbangan pertumbuhan kepada Provinsi Jambi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai sumber pertumbuhan

sektor ini sebesar 1,06 pada tahun 2007 dan 1,66 pada tahun 2008. Namun Pada tahun 2009 sektor Pertambangan dan Penggalian mulai diambil alih oleh sektor pertanian yaitu 2,04. Pada Tahun 2010 sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi kedua sumber pertumbuhan Provinsi Jambi dengan total sumbangan sebesar 1,67 persen, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan pertama dengan total sumbangan pertumbuhan sebesar 1,73. Secara agregat sumber pertumbuhan Provinsi Jambi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

3.5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Pendapatan Regional per kapita adalah PDRB setelah dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung neto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. Atau sama dengan PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi dibagi penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan Regional per kapita, mencerminkan pendapatan penduduk Provinsi Jambi yang tak lepas dari pengaruh besarnya PDRB dari tahun ke tahunnya.

PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Selama lima tahun yang lalu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 sebesar Rp. 9.712.622; tahun 2007 sebesar Rp. 11.697.441, dan tahun 2008 sebesar Rp. 14.724.721; tahun 2009 sebesar Rp.15.569.673; dan tahun 2010 sebesar 17.403.648; berarti ada kenaikan sebesar 11,78 persen dari tahun sebelumnya.

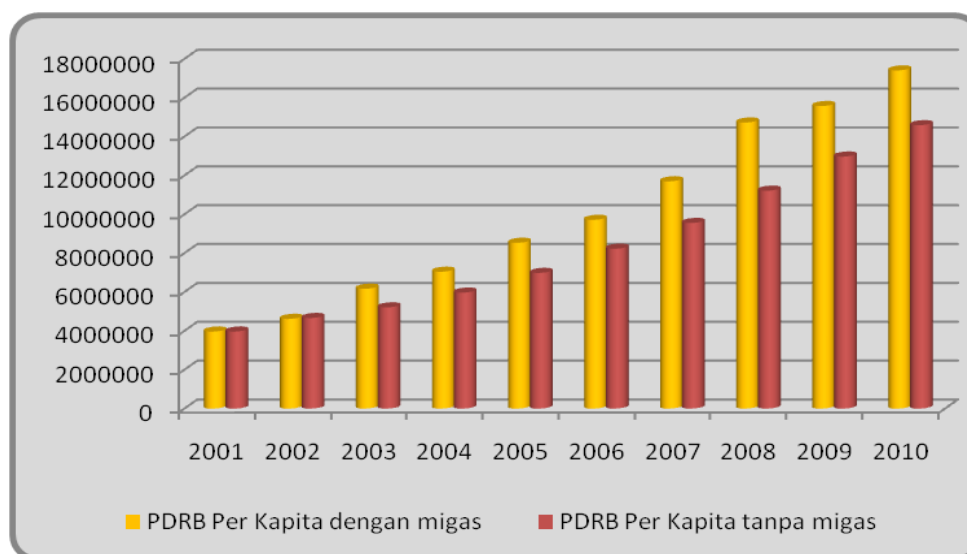
Begitu pula Pendapatan Regional Perkapita atas harga berlaku mengalami kenaikan dari tahun 2000 hingga tahun 2009. Selama lima tahun yang lalu, Pendapatan Regional per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 sebesar Rp. 8.669.663, pada tahun 2007 sebesar Rp. 10.433.186, pada tahun 2008 sebesar Rp. 13.167.677, tahun 2009 sebesar Rp. 13.888.586 serta pada tahun 2010 sebesar 15.571.674, yang menunjukkan kenaikan sebesar 12,12 persen dari tahun sebelumnya.

PDRB per kapita tanpa migas pada tahun 2008 sebesar Rp. 11.215.282, tahun 2009 mencapai Rp. 12.968.594, sedangkan tahun 2010 mencapai 14.582.446.

Tabel 3.6 PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita Provinsi Jambi Tahun 2001 – 2010

U R A I A N	Atas Dasar Harga Berlaku									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dengan Migas										
PDRB Per Kapita (Rp)	3.963.121	4.616.296	6.167.219	7.042.173	8.530.836	9.712.622	11.697.441	14.724.721	15.569.673	17.403.648
Pendapatan Per Kapita (Rp)	3.529.574	4.127.074	5.534.920	6.302.925	7.625.655	8.669.663	10.433.186	13.167.677	13.888.586	15.571.674
Tanpa Migas										
PDRB Per Kapita (Rp)	3.963.121	4.660.652	5.208.522	5.967.350	6.981.858	8.228.765	9.552.067	11.215.282	12.968.594	14.582.446
Pendapatan Per Kapita (Rp)	3.557.571	4.201.307	4.660.760	5.319.412	6.207.459	7.313.323	8.484.275	9.969.819	11.511.342	12.958.612

Grafik 3.8 PDRB Per Kapita Provinsi Jambi (Atas Dasar Harga Berlaku)



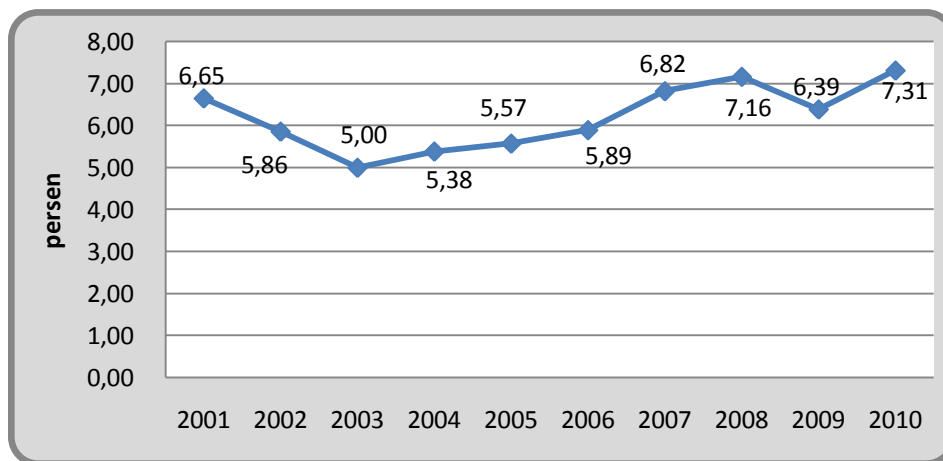
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi, karena pengaruh inflasi masih sangat dominan dalam pembentukan besaran PDRB maupun PDRN tersebut.

BAB IV

PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Perkembangan ekonomi Provinsi Jambi dalam kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, laju pertumbuhan tahun 2010 merupakan angka yang paling tinggi. Pada tahun 2001 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi Jambi terus mengalami perlambatan tiap tahunnya, dan terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar 5 persen. Namun mulai tahun 2004 hingga 2010 terus mengalami kenaikan, walau sempat pada tahun 2009 mengalami sedikit perlambatan. Pada tahun 2004 ekonomi Jambi tumbuh sebesar 5,38 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi terus meningkat menjadi 5,57 persen (2005), 5,89 (2006), 6,82 persen (2007), 7,16 persen (2008) dan 6,39 persen (2009). Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tercatat sebesar 7,31 persen.

**Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
Tahun 2001-2010**

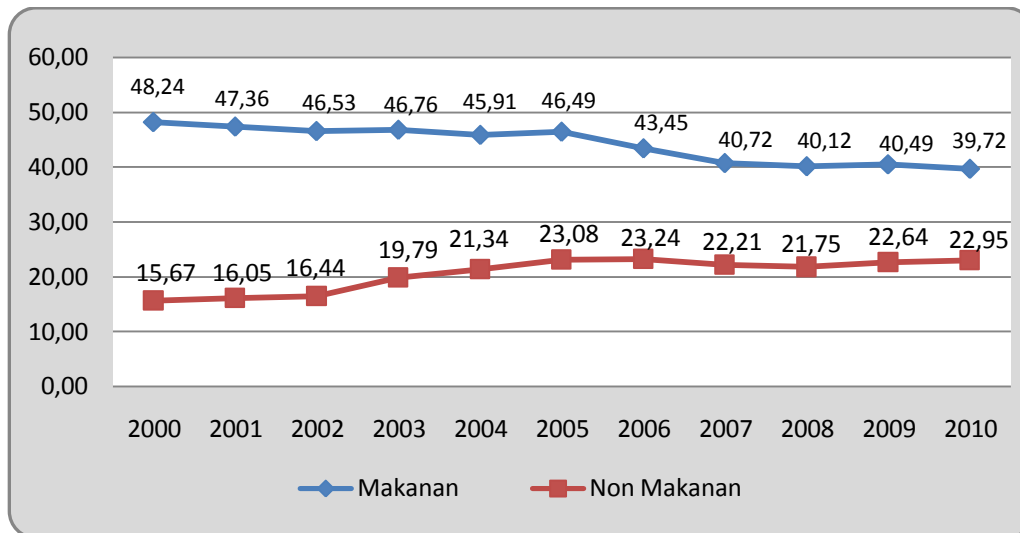


Perubahan pertumbuhan ini mempengaruhi pola distribusi penggunaan PDRB yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh produksi dan harga.

Pada rentang tahun 2000 hingga 2010 penggunaan terbesar masih untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2010 penggunaan PDRB untuk keperluan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 62,67 persen yang berarti terjadi

penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 63,12 persen.

Grafik 4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non makanan di Provinsi Jambi Tahun 2000-2010



Secara lebih rinci, pengeluaran konsumsi rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Hal yang menarik untuk kita cermati adalah adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Selang tahun 2000 hingga tahun 2010 pengeluaran rumah tangga untuk makanan menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan sebesar 43,45 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 turun menjadi 40,72 persen. Sedangkan tahun 2008 proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan turun menjadi 40,12 persen. Pada tahun 2009 kembali meningkat menjadi 40,49 persen dan pada tahun 2010 proporsinya menurun menjadi 39,72 persen. Sementara itu pengeluaran rumah tangga bukan makanan tahun 2000-2006 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, namun tahun 2007-2008 proporsinya cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 22,21 persen, dan 21,75 persen. Pada tahun 2009-2010 tren proporsinya cenderung meningkat masing-masing sebesar 22,64 persen dan 22,95 persen.

Jenis pengeluaran lain adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba, dari tahun 2000-2010, porsi tertinggi yaitu di tahun 2010 yaitu sebesar 0,63 persen. walaupun begitu ternyata pada rentang tahun 2004 hingga 2008 selalu mengalami penurunan porsinya dibandingkan tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar

0,47 persen, 0,53 persen, 0,50 persen, 0,44 persen dan 0,42 persen. Selain itu, perubahan stok turun 2,59 persen pada tahun 2006 menjadi 2,44 persen pada tahun 2007. Kemudian menurun lagi menjadi 2,31 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 2,43 persen setelah pada tahun 2009 sempat mengalami peningkatan menjadi 2,67 persen. Komponen lain yang mengalami kenaikan proporsi dibandingkan tahun sebelumnya adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dari 16,78 persen pada tahun 2009 menjadi 17,83 persen pada tahun 2010. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto juga mengalami peningkatan dari 16,77 persen menjadi 18,18 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2010 *share* ekspor mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yaitu dari 48,54 persen menjadi 52,86 persen. Sementara itu impor juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 48,44 persen menjadi 54,62 persen.

4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih tetap merupakan komponen yang paling dominan dalam penggunaan PDRB di Provinsi Jambi. Kontribusi komponen ini sejak tahun 2000 selalu berada di atas 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk Konsumsi Rumah Tangga baik itu makanan maupun non makanan (Tabel 3 Lampiran). Pada tahun 2006-2008 kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sedikit mengalami penurunan walaupun pada tahun 2009 mulai mengalami kenaikan, tetapi kembali menurun di tahun 2010 menjadi sebesar 62,67 persen.

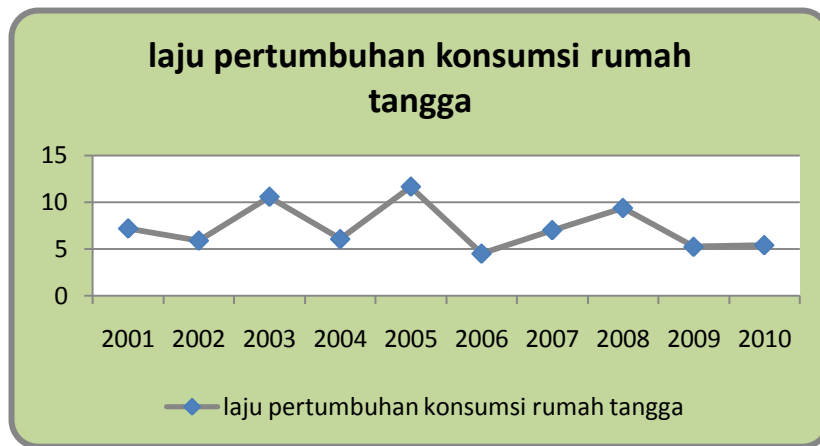
Tabel 4.1. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001-2010

Komponen		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63,91	63,41	62,97	66,55	67,25	66,69	62,93	61,87	63,12	62,67
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,38	0,38	0,39	0,47	0,53	0,50	0,44	0,42	0,55	0,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,41	15,18	16,18	16,73	16,84	17,07	16,16	15,31	16,78	17,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,05	14,72	14,08	14,15	14,53	15,23	17,19	15,13	16,77	18,18
5	Perubahan Stok	2,61	2,67	2,26	2,56	2,04	2,59	2,44	2,31	2,67	2,43
6	Ekspor Barang dan Jasa	46,64	44,83	40,74	38,13	35,79	40,59	49,25	57,44	48,54	52,86
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	43,00	41,18	36,62	38,58	36,98	42,66	48,42	52,48	48,44	54,62

PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bila dilihat lebih jauh rincian konsumsi rumah tangga tahun 2010, konsumsi untuk makanan sekitar 39,72 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 40,49 persen. Porsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi kelompok makanan ini masih merupakan pengeluaran utama bagi masyarakat Jambi. Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan hanya sebesar 22,95 persen.

Grafik 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Menurut Penggunaan (Komponen Konsumsi Rumah Tangga) Tahun 2001-2010



Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 11,66 persen. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya laju pertumbuhan konsumsi makanan yang mencapai 11,41 persen dibanding konsumsi tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan konsumsi makanan yang cukup tinggi ini dimungkinkan karena masyarakat cenderung melakukan penambahan jumlah konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan terutama pada masyarakat yang bekerja pada subsektor perkebunan.

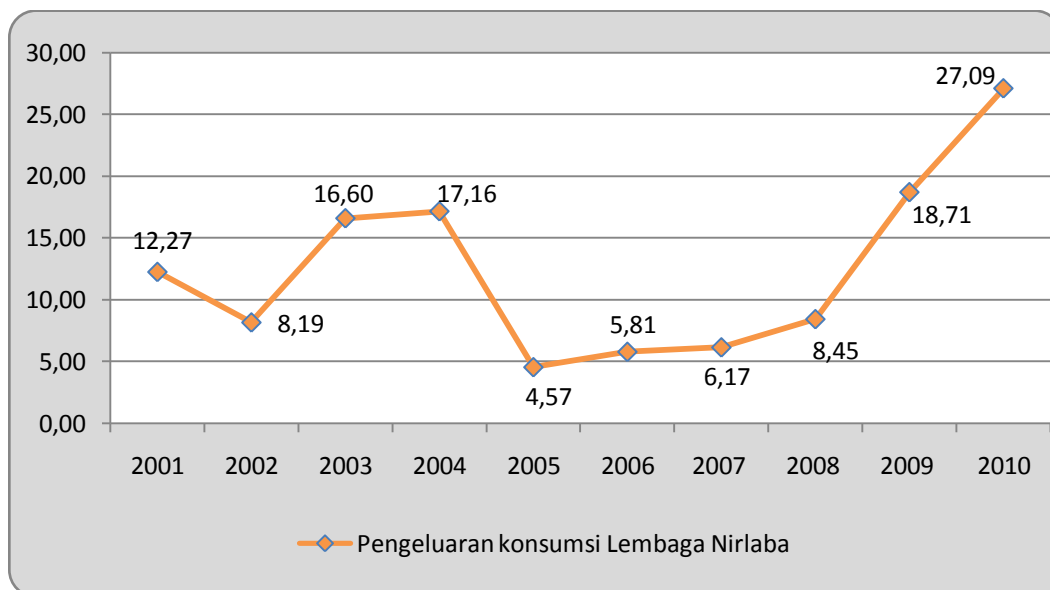
Konsumsi makanan mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2006 pertumbuhan konsumsi makanan mengalami percepatan menjadi 0,62 persen kemudian percepatannya naik pada tahun 2007 menjadi 5,42 persen. Tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi dengan percepatan sebesar 9,24 persen pada tahun 2008. Tahun 2009 mengalami penurunan dengan percepatan 5,72 persen

dan pada tahun 2010 laju konsumsi makanan melambat menjadi 5,55 persen. Sedangkan pada konsumsi non makanan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 13,13 persen dan tahun berikutnya turun menjadi 10,17 persen pada tahun 2007. Pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi non makanan kembali mengalami penurunan menjadi 9,65 persen (2008) dan 4,38 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan konsumsi non makanan kembali meningkat pada tahun 2010 menjadi 5,22 persen.

4.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 27,09 persen dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,71 persen. Kontribusi jenis pengeluaran ini hanya sekitar 0,63 persen dari total PDRB, kontribusi terbesar untuk sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan yang tinggi pada komponen ini, secara langsung meningkatkan kontribusi terhadap total PDRB penggunaan secara keseluruhan dimana dari tahun 2000 sampai tahun 2010 kontribusi pengeluaran lembaga swasta nirlaba relatif kecil yaitu berkisar antara 0,38 persen sampai 0,63 persen.

Grafik 4.4 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Menurut Penggunaan (Komponen Konsumsi Lembaga Nirlaba) Tahun 2001-2010



4.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

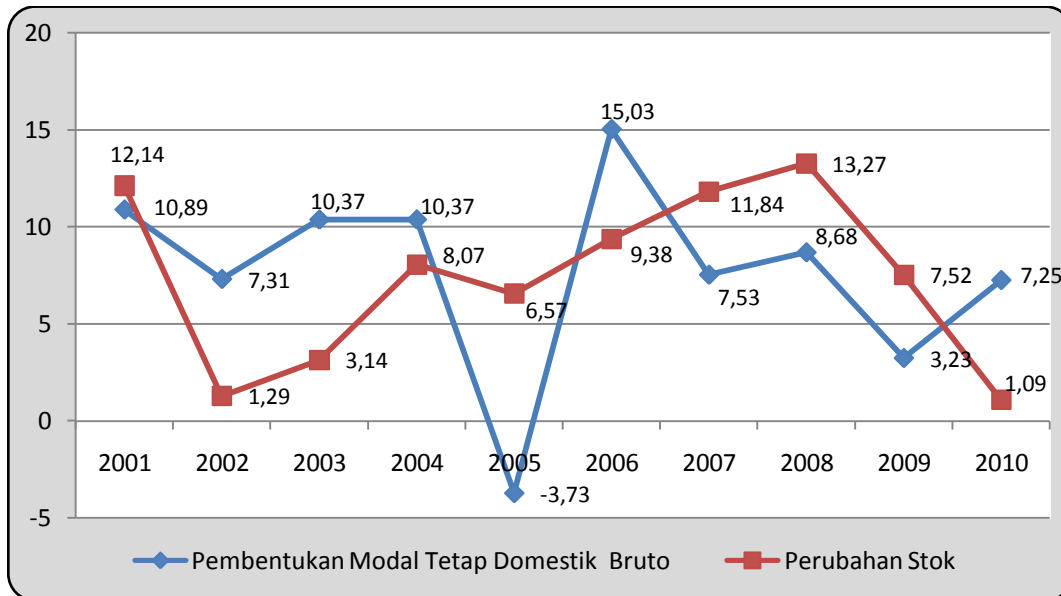
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 8,49 persen dan kontribusinya terhadap PDRB mencapai 17,83 persen. Selama kurun waktu 2000 sampai dengan tahun 2010, kontribusi pada tahun 2010 merupakan yang paling kecil. Sedangkan pertumbuhan komponen ini dalam kurun waktu antara tahun 2000 dan 2010 selalu berada di atas lima persen. Selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2006 komponen ini mempunyai peranan 17,07 persen, pada tahun 2007 komponen ini mempunyai peranan 16,16 persen, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 kontribusi komponen ini mencapai 15,31 persen dan 16,78 persen. Sedangkan tahun 2010 naik menjadi 17,83 persen.

4.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PMTB Provinsi Jambi tahun 2010 tumbuh sebesar 7,25 persen, lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke Jambi semakin menunjukkan peningkatan.

Kontribusi komponen ini terhadap PDRB Provinsi Jambi pada kurun waktu 2000 – 2010 sangat fluktuatif dimana kontribusi komponen ini pada tahun 2006 mencapai 15,23 persen, dan pada tahun 2007 naik menjadi 17,19 persen. Pada tahun 2008 kembali mengalami penurunan menjadi 15,13 persen, sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 kontribusinya meningkat menjadi 16,77 persen dan 18,18 persen .

**Grafik 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Menurut Penggunaan
[Komponen Pembentukan Modal Dan Perubahan Stok]
Tahun 2001-2010**



4.5. Perubahan Stok

Perubahan Stok tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar 1.309.575 juta rupiah. Pertumbuhan komponen Perubahan Stok pada tahun 2010 sebesar 1,09 persen ini berarti lebih kecil dari tahun 2009 yang tercatat 7,52 persen. Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan tahun 2010 merupakan pertumbuhan yang paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Perubahan Stok tahun 2006 sebesar 9,38 persen, sedangkan pertumbuhan tahun 2007 sebesar 11,84 persen. Pada tahun 2008 kembali meningkat menjadi 13,27 persen, namun laju pertumbuhan menurun pada tahun 2009 dan 2010 menjadi 7,52 persen dan 1,09 persen. Peranan komponen ini terhadap PDRB tahun 2010 mencapai 2,43 persen, sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan porsi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,67 persen.

4.6. Ekspor Dan Impor

Salah satu komponen penggunaan PDRB adalah ekspor dan impor, yang meliputi kegiatan ekspor dan impor antar negara maupun antar provinsi. Oleh karena penggunaan PDRB pada masing-masing komponen termasuk juga barang-barang impor, maka nilai impor merupakan faktor pengurang dari nilai ekspor untuk mendapatkan ekspor netto. Ukuran keterbukaan perekonomian suatu daerah dapat ditunjukkan oleh peranan perdagangan provinsi tersebut dengan luar negeri dan luar daerah (luar provinsi).

Komponen ekspor Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar 28.447.386 juta rupiah. Lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 21.419.282 juta rupiah. Sedangkan nilai impor Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah sebesar 29.392.241 juta rupiah juga lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 21.375.480 juta rupiah.

Baik ekspor maupun impor Provinsi Jambi tahun 2010 menunjukkan peningkatan. Namun nilai ekspor netto atau selisih antara nilai ekspor dan nilai impor mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena nilai impor mengalami pertumbuhan yang lebih besar dari pada nilai ekspor.

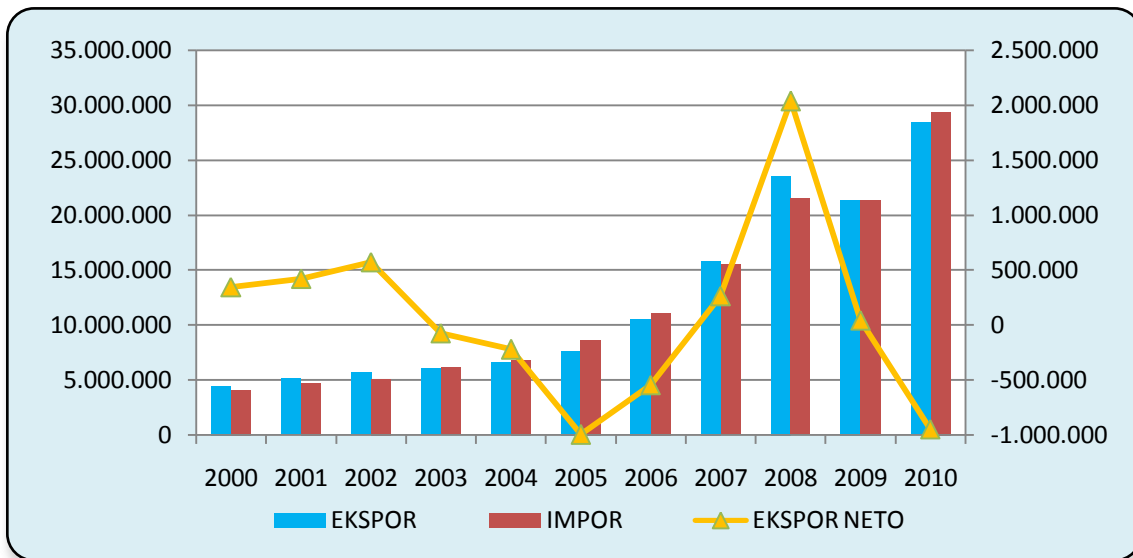
**Tabel 4.2 Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Jambi
Tahun 2000-2010**

TAHUN	EKSPOR	IMPOR	EKSPOR NETO
2000	4.462.739	4.115.027	347.712
2001	5.169.149	4.748.671	420.479
2002	5.679.228	5.104.710	574.519
2003	6.072.951	6.145.910	-72.959
2004	6.616.663	6.836.804	-220.141
2005	7.661.558	8.655.187	-993.630
2006	10.578.419	11.119.250	-540.831
2007	15.797.612	15.531.578	266.034
2008	23.582.886	21.546.070	2.036.817
2009	21.419.282	21.375.480	43.803
2010	28.447.386	29.392.241	-944.855

Sebagaimana ekspor-impor antarnegara, ekspor-impor antarprovinsi juga mengalami peningkatan. Nilai impor Jambi menunjukkan bahwa sebagian besar

impor yang dilakukan Provinsi Jambi justru dari perdagangan antar provinsi. Hal ini menunjukkan ketergantungan Provinsi Jambi terhadap provinsi lain di sekitarnya cukup besar. Hal ini juga terlihat dari kecilnya nilai ekspor dari Provinsi Jambi ke provinsi lain yang mengakibatkan ekspor netto antar Provinsi Jambi tahun 2010 bernilai negatif.

Grafik 4.6 Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Jambi Tahun 2000-2010



Jika dibandingkan, porsi impor dan ekspor antarprovinsi tahun 2010 terhadap PDRB, maka komponen ekspor mempunyai porsi sebesar 52,86 persen dan komponen impor sebesar 54,62 persen. Sehingga terlihat bahwa neraca perdagangan Provinsi Jambi masih minus.

4.7. Tingkat dan Laju Pertumbuhan Konsumsi

Total pengeluaran untuk konsumsi penduduk suatu wilayah sangat banyak dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan dalam masyarakat, perkembangan jumlah penduduknya dan kemampuan penduduk wilayah itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagian Pendapatan masyarakat akan digunakan atau dikeluarkan untuk konsumsi, baik makanan maupun non

makanan. Disamping itu, pada umumnya peningkatan pendapatan akan mengubah konsumsi secara total maupun jenis barang yang dikonsumsi yang berakibat berubahnya total pengeluaran untuk konsumsi. Untuk perbandingan satu wilayah antar tahun atau antar wilayah dapat digunakan ukuran umum yaitu APC [Average Propensity to Consume] dan MPC [Marginal Propensity to Consume].

APC didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran untuk konsumsi dengan total pendapatan atau PDRB. Dengan kata lain APC merupakan ratio pengeluaran untuk konsumsi [C] dengan PDRB [Y] pada suatu wilayah. MPC merupakan ratio pertambahan konsumsi [ΔC] dengan pertambahan pendapatan [ΔY] pada suatu wilayah.

**Tabel.4.3 Average to Consume [APC] dan
Marginal Propensity to Consume [MPC] Provinsi Jambi
Tahun 2001-2010**

TAHUN	APC	MPC
2001	0,63	0,61
2002	0,63	0,61
2003	0,67	0,92
2004	0,67	0,72
2005	0,72	0,97
2006	0,67	0,30
2007	0,63	0,47
2008	0,62	0,58
2009	0,63	0,80
2010	0,63	0,61

MPC Provinsi Jambi dari tahun 2007 mengalami penurunan dari tahun ke tahun dibandingkan tahun 2003, hal ini menunjukkan adanya indikasi perbaikan kondisi ekonomi di Provinsi Jambi dimana peningkatan pendapatan yang terbentuk secara proporsional lebih banyak digunakan untuk komponen lain daripada untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun pada tahun 2008 dan 2009 mulai mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang terbentuk secara proporsional lebih banyak digunakan untuk komponen

pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2010 nilai MPC menurun menjadi 0,61. Jika nilai MPC menurun mengindikasikan adanya kondisi ekonomi yang menguntungkan dimana peningkatan pendapatan yang terbentuk tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga tetapi juga untuk pengeluaran komponen lain.

4.8. Incremental Capital Output-Ratio [ICOR]

Peningkatan PDRB dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan bertambahnya besaran investasi yang tercermin pada meningkatnya pembentukan modal tetap bruto. Selanjutnya investasi ini akan digunakan untuk menambah produksi barang dan jasa yang mendorong peningkatan PDRB dimana diharapkan dapat menambah kemampuan investasi lagi, demikian seterusnya. Merupakan suatu indikator kebutuhan bahwa kapital diperlukan guna melaksanakan pembangunan ekonomi regional. Kebutuhan ini dirasakan semakin banyak diperlukan dari tahun ke tahun.

Suatu besaran yang menunjukkan tambahan kapital/investasi yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output yang diinginkan disebut ICOR [incremental Capital Output Ratio]

ICOR merupakan suatu ratio/nisbah antara pertambahan kapital terhadap pertambahan output. ICOR adalah salah satu ukuran yang mencerminkan hubungan proporsional antara kapital dan output, maka seperti ukuran lainnya dalam sektor riil (produktivitas dan sejenisnya) harus dinyatakan atau dihitung berdasarkan investasi dan output atas dasar harga konstan.

Dengan pertimbangan jenis investasi yang digunakan dan sifat kegiatan yang dilakukan, dapat ditentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kenaikan output dari investasi yang ditanamkan. Jangka waktu tersebut biasa disebut Lag, yang bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun bahkan lebih. Dalam praktek dibutuhkan data runtun berkala (*time series*) dimana output pada tahun ke-t dianggap merupakan hasil dari jumlah investasi pada tahun ke-t dan tahun-tahun sebelumnya (khususnya perhitungan ini banyak digunakan untuk sektor Pertanian). Untuk menghindari salah tafsir, karena investasi yang dilakukan pada suatu tahun belum tentu menghasilkan output pada tahun tersebut, maka penyajian ICOR dilakukann secara kumulatif

Dalam sepuluh tahun terakhir ICOR Provinsi Jambi pada kurun waktu tahun 2000-2001 sampai dengan 2000-2010 dalam kisaran nilai antara 2,84 sampai dengan 4,45. Nilai ICOR dalam kurun waktu tahun 2000-2001 sampai dengan tahun 2000-2010 setiap tahun mengalami penurunan. Nilai ICOR pada kisaran tahun 2000-2010 adalah sebesar 2,84 yang berarti untuk menaikkan satu unit output di Provinsi Jambi pada kisaran tahun 2000-2010 diperlukan investasi 2,84 unit. Nilai ICOR pada tahun 2000-2010 ini sedikit lebih rendah dibandingkan kisaran tahun 2000-2009 yang sebesar 2,93.

Tabel. 4.4 *Incremental Capital Output-Ratio [ICOR] Provinsi Jambi Tahun 2000-2010*

TAHUN	ICOR
2000-2001	4,45
2000-2002	3,59
2000-2003	3,49
2000-2004	3,42
2000-2005	3,29
2000-2006	3,21
2000-2007	3,08
2000-2008	2,97
2000-2009	2,93
2000-2010	2,84

Pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, seperti efisiensi proses produksi dan intensifikasi. Dalam penghitungan ICOR disini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan.

BAB V

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH

5.1 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah

Berbicara masalah ketimpangan pendapatan, tidak akan terlepas dari dua komponen pembentuknya yakni PDRB per Kapita dan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang diciptakan setiap penduduk melalui aktivitas produksi. Jika PDRB per kapita meningkat, secara hipotesis pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga ukuran ini dapat disajikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Secara nominal, PDRB perkapita Jambi terus meningkat dari tahun 2000 sebesar 3.975.315 rupiah menjadi 17.403.648 rupiah pada tahun 2010. Peningkatan ini mengisyaratkan terjadi peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat. Peningkatan ini akan memperbaiki daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Angka PDRB Perkapita suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk daerah bersangkutan. Keduanya memiliki hubungan berbanding terbalik. Perkembangan PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk pada tahun 2000-2010 terlihat dalam tabel 5.1. Secara riil, pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2008. Tingginya laju PDRB perkapita pada tahun 2008 sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun tersebut.

**Tabel 5.1 Perkembangan PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jambi Tahun 2001-2010**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (%)	Jumlah Penduduk	PDRB per Kapita ADHB (rupiah)
2001	6,65	5,22	2.439.873	4.726.387
2002	5,86	3,98	2.484.027	5.612.072
2003	5,00	1,54	2.568.598	6.201.251
2004	5,38	3,33	2.619.553	7.057.671
2005	5,57	4,91	2.635.968	8.530.836
2006	5,89	4,03	2.683.099	9.713.311
2007	6,82	4,52	2.742.196	11.697.441
2008	7,16	5,39	2.788.269	14.724.721
2009	6,39	4,66	2.834.164	15.569.673
2010	7,31	-1,64	3.092.265	17.403.648

Besar kecilnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Jambi. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dan dijelaskan dengan menggunakan beberapa rumus atau formula. Dalam tulisan ini, digunakan rumus atau formula yang dikemukakan oleh Williamson (1965), yang kemudian dikenal dengan Indeks Williamson (Iw). Nilai Iw yang kecil menggambarkan tingkat ketimpangan yang rendah atau tingkat pemerataan yang lebih baik, dan sebaliknya apabila nilai Iw besar maka menggambarkan tingkat ketimpangan yang tinggi atau tingkat pemerataan yang semakin timpang.

Setelah dilakukan penghitungan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dapat dilihat bahwa rata-rata indeks ketimpangan pendapatannya adalah sebesar 0,316, hal ini mengindikasikan bahwa nilai indeks ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi berkategori sedang. Selain itu dapat dilihat juga bahwa perkembangan ketimpangan setiap tahun mengalami fluktuasi. Kondisi ini dapat diketahui dari nilai penghitungan Indeks Williamson seperti yang terlihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Indeks Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2000-2010

Tahun	Indeks Williamson
2000	0,3425
2001	0,3674
2002	0,3995
2003	0,3812
2004	0,3825
2005	0,4045
2006	0,3910
2007	0,3848
2008	0,4897
2009	0,4137
2010	0,3160

Dari tabel 5.2. terlihat bahwa nilai Indeks Williamson (Iw) terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 0,3160, sedangkan nilai Iw tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 0,4897. Secara umum, penyebab ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah faktor kepemilikan sumber daya alam dan persebaran penduduk. Beberapa kabupaten seperti Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, dan Kota Jambi memiliki sumber migas sementara kabupaten lainnya tidak memiliki migas. Seperti diketahui, komoditas migas produksinya agak sulit diprediksi, begitu juga dengan harganya. Pada tahun 2008 harga migas mencapai harga tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada melonjaknya nilai tambah migas sekaligus nilai nominal PDRB ADHB pada wilayah yang memiliki migas. Dari sinilah ketimpangan antar wilayah berasal.

5.2 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Typology Klassen

Selain melihat angka ketimpangan dengan indeks Williamson, ketimpangan yang terjadi dapat dilihat juga dengan analisis *Klassen Typology*. Melalui analisis *Klassen Typology*, dapat dilihat bagaimana pengklasifikasian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini, analisis Klassen Typology digunakan untuk membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB per kapita, daerah yang diamati dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*); (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*); (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*); dan (4) daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Berdasarkan hasil pengelompokan dengan Klassen Typology seperti terlihat pada grafik 5.1 yang menggunakan rata-rata pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita tahun 2000-2010, tidak ada satupun kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju dan tumbuh cepat. Pada daerah maju tapi tertekan terdapat tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh. Ketiganya adalah daerah yang memiliki PDRB per kapita diatas rata-rata provinsi tetapi dalam periode penelitian mengalami pertumbuhan yang relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi. Pada klasifikasi daerah yang berkembang

cepat terdapat dua kabupaten yaitu Sarolangun dan Merangin. Daerah ini mempunyai potensi yang besar sehingga pertumbuhannya cepat, namun pendapatannya masih dibawah pendapatan rata-rata provinsi. Rendahnya pendapatan ini juga dipengaruhi oleh besar/kecilnya jumlah penduduk yang ada di dua kabupaten tersebut. Sedangkan pada daerah yang relatif tertinggal terdapat enam kabupaten/kota yaitu Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, dan Kerinci. Wilayah yang masuk pada kategori ini, pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dari rata-rata provinsi. Namun, walaupun keenam kabupaten tersebut dikategorikan dalam daerah relatif tertinggal, akan tetapi jika dilihat secara seksama pada gambar 5.1. terlihat bahwa Kabupaten Kerinci, Bungo, Batanghari dan Kota Jambi cenderung mendekati kuadran satu, daerah maju tapi tertekan. Dari gambar 5.1. terlihat bahwa plot kabupaten/kota cenderung berkumpul mendekati garis rata-rata, hal ini mengindikasikan bahwa klasifikasi pembangunan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi relatif merata.

Pengklasifikasian berdasarkan Klassen Typology ini bersifat dinamis karena sangat tergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan pada provinsi yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa dalam periode waktu penelitian yang berbeda, pengklasifikasian akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan laju pertumbuhan dan tingkat PDRB per kapita di masing-masing daerah pada saat itu.

Grafik 5.1 Plot Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Typology Klassen di Provinsi Jambi

